



LAPORAN KINERJA DJPB TAHUN 2021



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2021 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya selama tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 24 Januari 2022
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya,



Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi,
M.Sc



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumberdaya Manusia	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	4
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budidaya	7
Visi	7
Misi	7
Tujuan	7
Sasaran Strategis.....	8
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2021	9
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Analisis Capaian Kinerja	14
SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya	14
SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat	19
SS.3. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan	20
SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya.....	24
SS.5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Partisipatif.....	33
SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	49
3.3. Efisiensi Anggaran	66
3.3 Akuntabilitas Keuangan	67
BAB IV. PENUTUP	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021.....	13
Tabel 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2021	15
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021	20
Tabel 5. Hasil evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup DJPB TA 2020	24
Tabel 6. Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2017-2021	24
Tabel 7. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Tahun 2021 **	33
Tabel 8. Realisasi Jumlah Sampel Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya Tahun 2021	35
Tabel 9. Data Sampel Pengujian Sampel Non Compliance Tahun 2021	36
Tabel 10. Realisasi Jumlah Sampel Monitoring dan Surveilans Penyakit Ikan Tahun 2021	36
Tabel 11. Realisasi Sertifikasi CBIB Tahun 2021	39
Tabel 12. Jumlah Unit Sertifikasi dan Jumlah Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik Yang terbit Tahun 2021	40
Tabel 13. Unit Produksi Pakan Ikan Yang Lulus Sertifikasi CPPIB Tahun 2021 ...	45
Tabel 14. Sampel Pakan Ikan Yang Diambil dan Dianalisis Mutunya Tahun 2021	46
Tabel 15. Sampel Obat Ikan Yang Diambil dan Dianalisis Mutunya Tahun 2021	48
Tabel 16. Rincian Nilai PMPRB Ditjen PB Tahun 2021	50
Tabel 17. Nilai PMPRB KKP Tahun 2020	50
Tabel 18. Capaian IP ASN KP Tahun 2019	52
Tabel 19. Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP”	55
Tabel 20. Hasil Evaluasi Itjen atas SAKIP KKP Tahun 2020	57
Tabel 21. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	62
Tabel 22. Efisiensi Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Sasaran Kegiatan	67
Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 dan 2020	68
Tabel 24. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Tahun 2021 dan 2020	68

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2021, capaian nilai per sasaran strategis Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar 105,07%. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

Dari 22 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan delapan belas indikator kinerja telah mencapai target yaitu :

1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercapai 100,25 % dari target 102
2. Rata-rata pendapatan pembudidaya, tercapai 126,06 % dari target RP.3.500.000
3. Nilai PNB dari perikanan budidaya, tercapai 122,31% dari target Rp.19,90 milyar
4. Percontohan Pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (Kawasan) tercapai 100% dari target 10 kawasan
5. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tercapai 119,72 % dari target 72,5
6. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor, tercapai 103,80 % dari target 6.647
7. Nilai PM PRB DJPB, tercapai 104,87% dari target 31
8. Indeks profesionalitas ASN DJPB, tercapai 110,88 % dari target 73
9. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2020, tercapai 120 % dari target <1 %
10. Nilai PM Sakip DJPB tercapai 100,45% dari target 86,15
11. Tingkat maturitas SPIP tercapai 100% dari target tingkat 3
12. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tercapai 116,42% dari target 65
13. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi, tercapai 100% dari target 8
14. Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tercapai 118,92 % dari target 84.
15. Unit yang menerapkan inovasi layanan publik tercapai 200% dari target 1
16. Nilai IKPA DJPB, tercapai 102,55% dari target 89
17. Nilai Kinerja Anggaran tercapai 104,52% dari target 86
18. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN tercapai 110,34% dari target 72,5

Empat Indikator tidak tercapai yaitu :

1. Tingkat kemandirian SKPT Ditjen Perikanan Budidaya tercapai 90 % dari target tingkat 4
2. Produksi Perikanan Budidaya (juta ton) tercapai 84,18% dari target 19,47 juta ton
3. Produksi ikan hias (miliar ekor) tercapai 74,24% dari target 1,98 juta ekor
4. Tingkat Kepatuhan Penagdaan Barang dan Jasa tercapai 76,22% dari target 72,5

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa IKU yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budidaya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

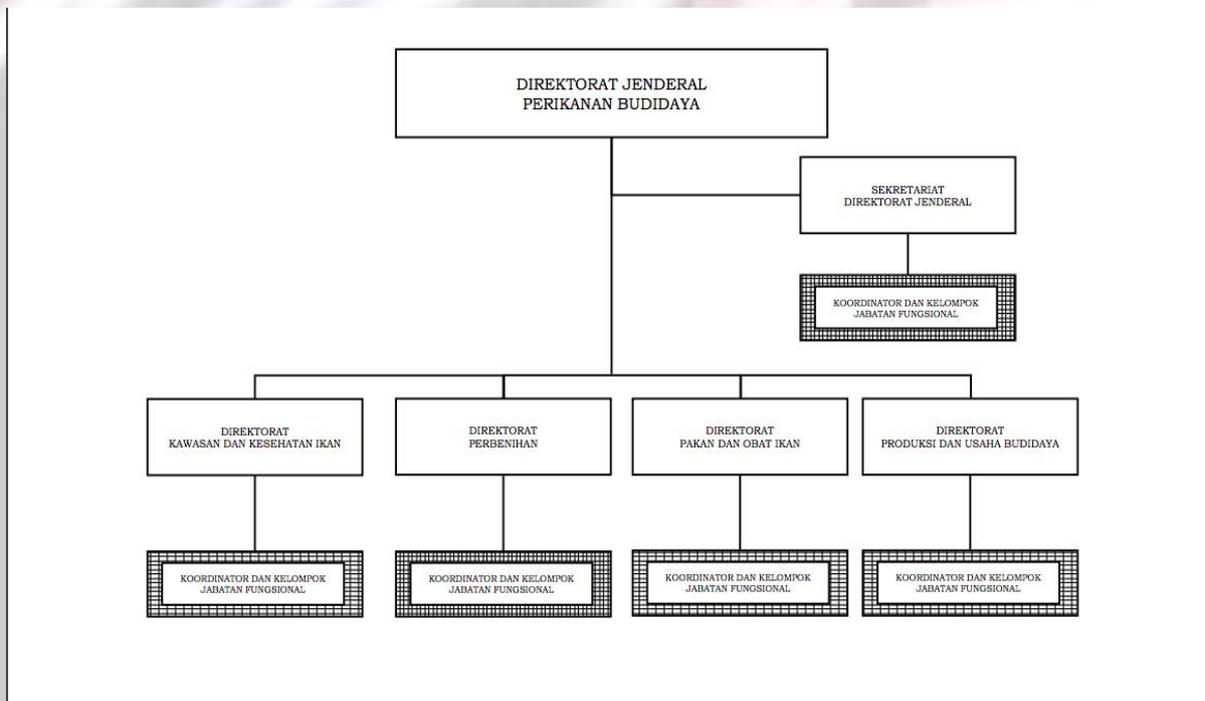
Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2020 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referens dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budidaya kedepan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya; ii) pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya; iii) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya; iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya; v) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya; vi) pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Budidaya; dan vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budidaya

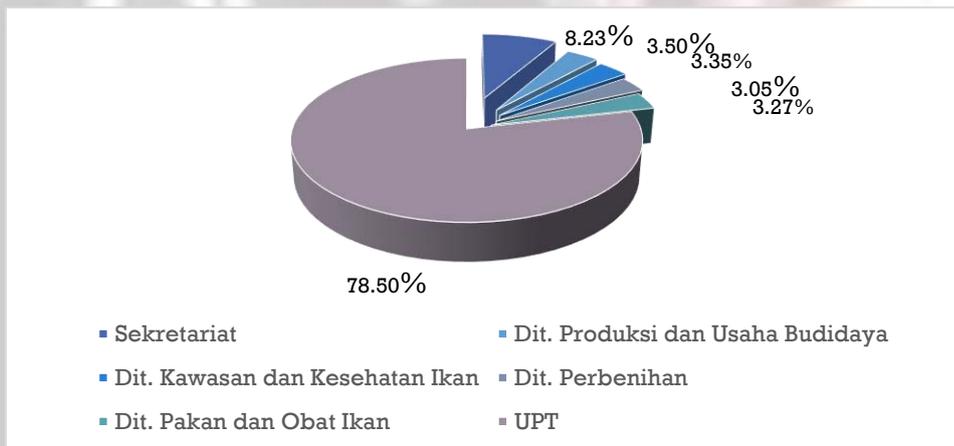
Selain itu Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya meliputi:

1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
3. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandingain

5. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
6. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem
14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang
15. Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang

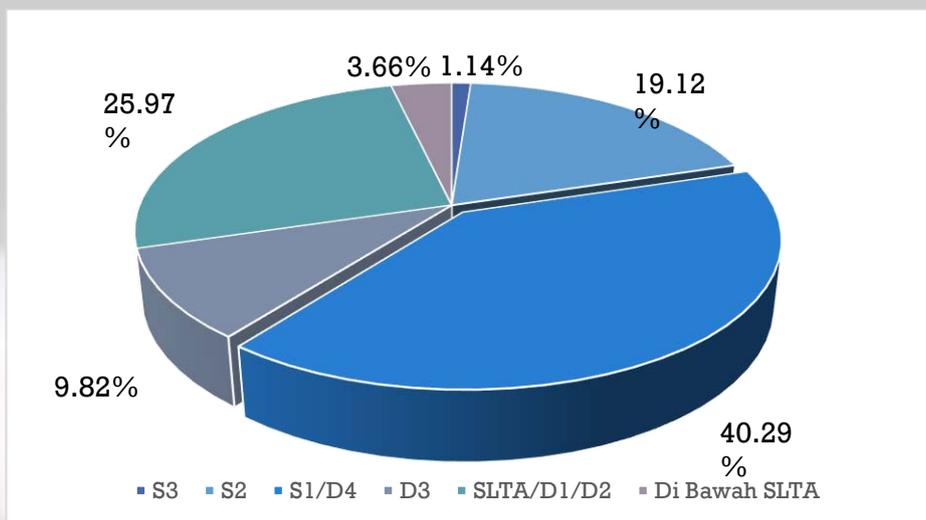
1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Triwulan 4 Tahun 2021 adalah 1.313 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 5 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 108 orang (8,23%); (ii) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sejumlah 46 orang (3,50%); (iii) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sejumlah 44 orang (3,35%); (iv) Direktorat Perbenihan sejumlah 40 orang (3,05%); (v) Direktorat Pakan dan Obat Ikan sejumlah 43 orang (3,27%); dan (vi) UPT sejumlah 1.032 orang (78,60%).



Gambar 2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM DJPB adalah sebagai berikut : (i) S3 sejumlah 15 orang (1,14%); (ii) S2 sejumlah 251 orang (19,12%); (iii) S1/D4 sejumlah 529 orang (40,29%); (iv) D3 sejumlah 129 orang (9,82%); (v) SLTA/D1/D2 sejumlah 347 orang (25,97%); dan (vi) di bawah SLTA sejumlah 48 orang (3,66%).



Gambar 3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan

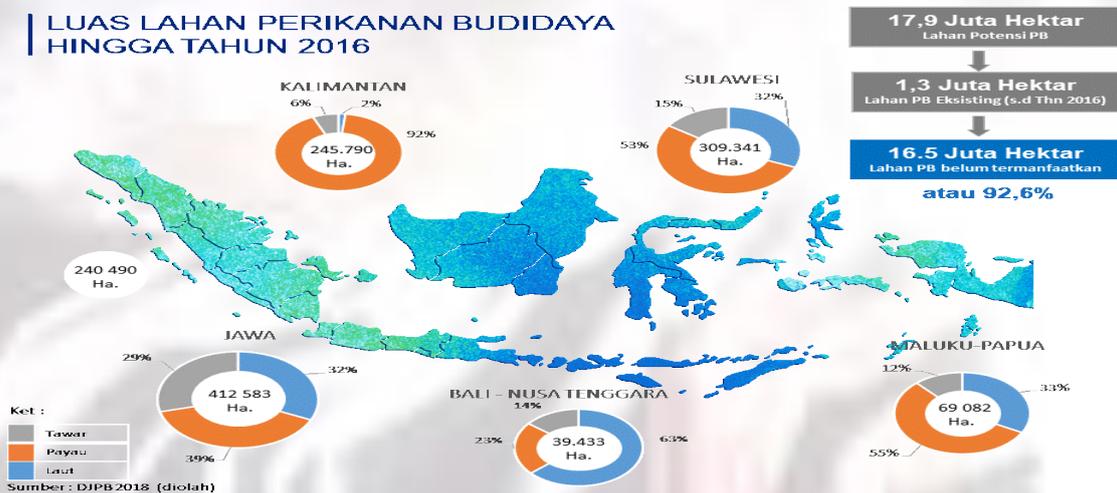
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya

Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budidaya air payau 2,96 juta ha dan budidaya laut 12,12 juta ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budidaya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budidaya air tawar, 22,74 persen pada budidaya air payau dan 2,28 persen untuk budidaya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budidaya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budidaya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budidaya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budidaya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal.

Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budidaya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara budidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budidaya; dan (viii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budidaya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budidaya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.



Gambar 4. Potensi Perikanan Budidaya

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DJPB Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selama tahun 2021.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2021 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2021, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta evaluasi

dan analisis kinerja tahun 2020. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budidaya

Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “**Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan**” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Misi

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;

- b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan, dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budidaya sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) DJPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
 - b. Pendapatan Pembudidaya sebesar Rp 3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp 3.700.000,- pada tahun 2024.
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat" dengan Indikator Kinerja: Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 19,14 Miliar di tahun 2020 dan Rp 23,77 Miliar di tahun 2024.
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya dengan target 4 pada tahun 2020 dan 5 pada tahun 2024;
 - b. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada tahun 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024;
 - c. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Produksi Perikanan Budidaya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024; dan
 - b. Produksi Ikan Hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024.
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif", dengan indikator pengujian residu produk perikanan budidaya yang partisipatif sebesar 13.630 paket pada tahun 2020 dan 30.730 paket pada tahun 2024; yang terdiri dari :

- a. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan 500 paket pada tahun 2020 dan 500 paket pada tahun 2024
 - b. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan 10.000 paket pada tahun 2020 dan 26.000 paket pada tahun 2024
 - c. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha 3.000 paket pada tahun 2020 dan 4.000 paket pada tahun 2024
 - d. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan 130 paket pada tahun 2020 dan 230 paket pada tahun 2024
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Nilai PM PRB DJB dengan nilai 30 di tahun 2020 dan 34 pada tahun 2024
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesar 72 di tahun 2020 dan 76 pada tahun 2024
 - c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 10 unit kerja pada tahun 2024
 - d. Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar ≤ 1 pada tahun 2020 – 2024
 - e. Nilai PM SAKIP DJPB dengan nilai 85 pada tahun 2020 dan 86,75 pada tahun 2024
 - f. Tingkat Maturitas SPIP level 3 pada tahun 2020 – 2024
 - g. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024
 - h. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar 82 persen pada tahun 2020 dan 90 persen pada tahun 2024
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik 1 unit pada tahun 2020 – 2024
 - j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budidaya 88 pada tahun 2020 dan 90 pada tahun 2024
 - k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 89 pada tahun 2024.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2021 dilakukan revisi karena pada Triwulan III anggaran DJPB terkena refocusing yang mengakibatkan adanya perubahan target. secara rinci PK Tahun 2021 sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Slamet Soebjako**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
 Selanjutnya disebut pihak pertama

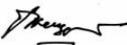
Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
 Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Slamet Soebjako

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA		
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	102,00
	2 Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	3.500.000
2 Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat	3 Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	19,90
	4 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJPB (Tingkat)	4
3 Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	5 Percontohan Pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (Kawasan)	28
	6 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	72,5
	7 Produksi perikanan budidaya (Juta ton)	19,47
4 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	8 Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,98
	5 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	9 Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi ekspor (paket)
10 Nilai PM PRB DJPB (Nilai)		31
11 Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)		73
6 Terwujudnya Birokrasi lingkup DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	12 Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) (unit)	8
	13 Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan Keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2020 (%)	≤1
	14 Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)	86,15
	15 Tingkat Maturitas SPIP (level)	3
	16 Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	65

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	17 Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84
	18 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
	19 Nilai IKPA DJPB (nilai)	89
	20 Nilai NKA DJPB (nilai)	86
	21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (%)	72,5
	22 Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN (%)	72,5

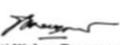
Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
2. Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp 1.212.740.404.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	867.539.558.000
	- Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	494.523.514.000
	- Pengelolaan Perbenihan Ikan	199.405.666.000
	- Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	56.110.378.000
	- Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	117.500.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	345.200.846.000

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

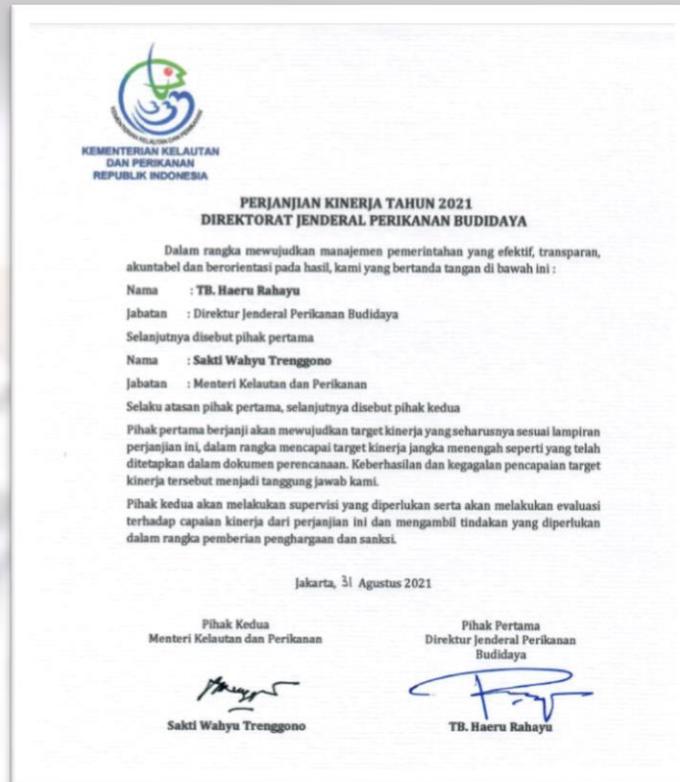


Slamet Soebjako

No	Jabatan	Paraf
1	Besidjen PB	
2	Koordinator Program	

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2021

Pada bulan Agustus 2021 terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan adanya perubahan target kinerja sehingga Perjanjian kinerja pun di Revisi sesuai dengan anggaran yang sudah difocusing.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA		
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102,00
	2 Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	3.500.000
2 Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat	3 Nilai PNPB dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	19,90
	4 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJPB (Tingkat)	4
3 Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	5 Percontohan Pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (Kawasan)	10
	6 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	72,5
4 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	7 Produksi perikanan budidaya (Juta ton)	19,47
	8 Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,98
5 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	9 Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi ekspor (paket)	6.847
	10 Nilai PM PRB DJPB (Nilai)	31
6 Terwujudnya Birokrasi lingkup DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	11 Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	73
	12 Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) (unit)	8
	13 Batas tertinggi Persentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2020 (%)	≤1
	14 Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)	86,15
	15 Tingkat Maturitas SPIP (level)	3
	16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	65

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 2. Dukungan Manajemen Jumlah Anggaran Tahun 2021: Rp 782.065.357.000,-	17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84
	18 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
	19 Nilai IKPA DJPB (nilai)	89
	20 Nilai NKA DJPB (nilai)	86
	21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (%)	72,5
	22 Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN (%)	72,5

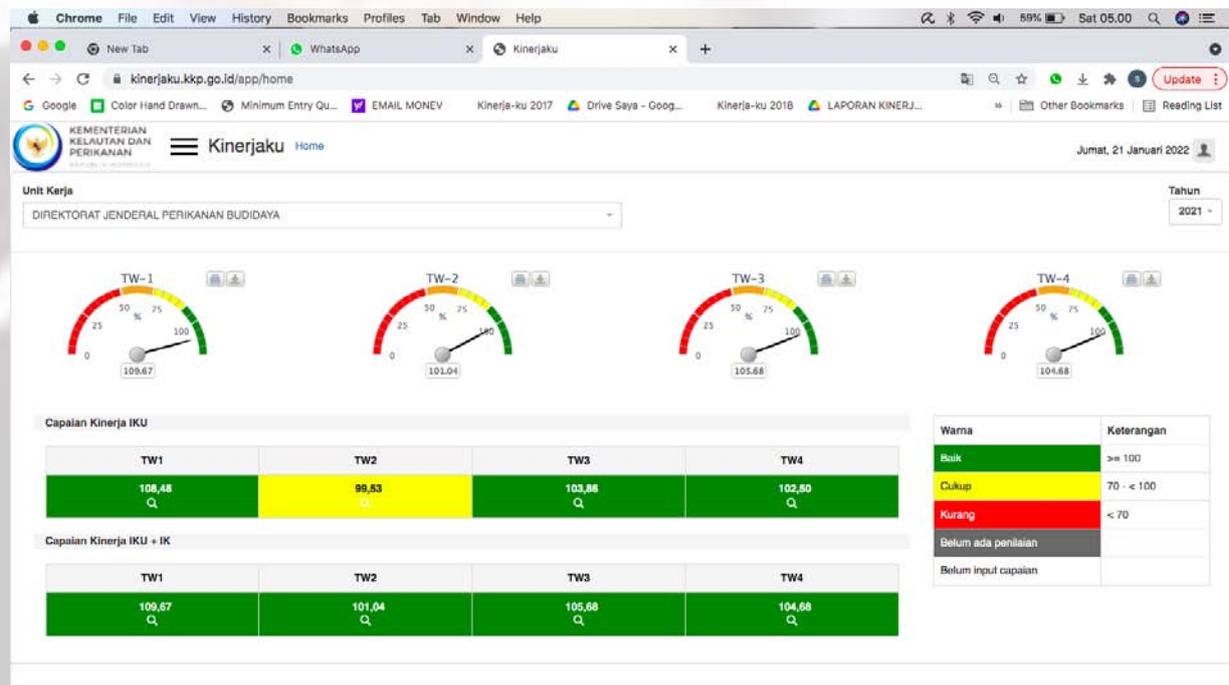
No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	482.591.876.000
	- Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	246.980.622.000
	- Pengelolaan Perbenihan Ikan	114.178.412.000
	- Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	35.322.836.000
	- Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	86.110.006.000
2	Program Dukungan Manajemen	299.473.481.000

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya setelah refocusing

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Knerjaku", berikut capaian NPSS Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2021.



Gambar 7. NPSS Tahun 2021

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada tahun 2020 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya menitikberatkan pada enam Sasaran Strategis dengan dua puluh satu Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Tahun 2021 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102,00	102,25	100,25
2	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	3.500.000	4.412.001	126,06
3	Nilai PNB dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	19,90	24,34	122,31
4	Tingkat Kemandirian SKPT Ditjen Perikanan Budidaya (Tingkat)	4	3,6	90
5	Percontohan Pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (Kawasan)	10	10	100
6	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	72,5	86,80	119,72
7	produksi Perikanan Budidaya (juta ton)	19,47	16,39	84,18
8	produksi ikan hias (miliar ekor)	1,98	1,47	74,24
9	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor (paket)	6.847	7.107	103,80
10	Nilai PM PRB DJPB (Nilai)	31	32,51	104,87
11	Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	73	80,94	110,88
12	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	8	8	100
13	Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2020 (%)	≤1	0,20	120
14	Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)	86,15	86,54	100,45
15	Tingkat Maturitas SPIP (Level)	3	3	100
16	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	65	80,95	116,42
17	Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	84	99,92	118,92
18	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public	1	2	200
19	Nilai IKPA DJPB	89	91,27	102,55
20	Nilai Kinerja Anggaran DJPB	86	89,89	104,52

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	72,5	55,26	76,22
22	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN	72,5	80,00	110,34

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya merupakan tujuan dari program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sasaran ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu:

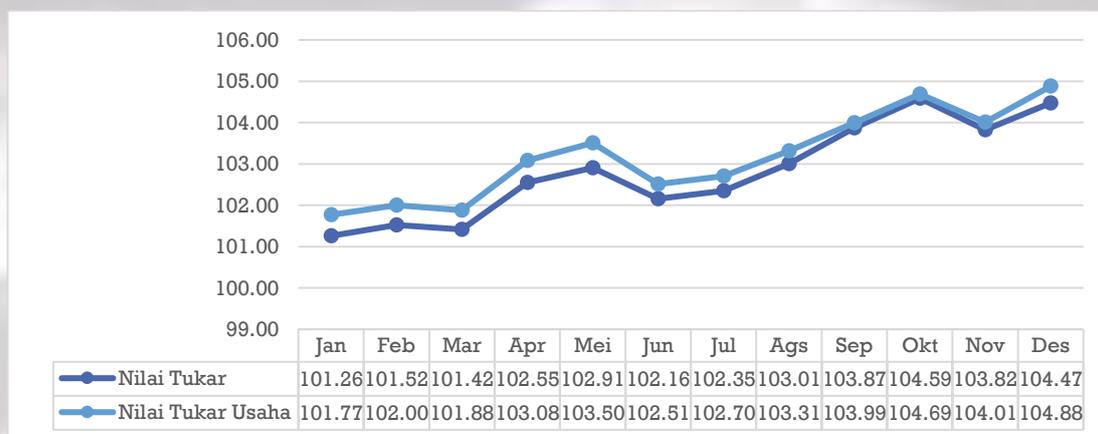
IK.1 Nilai Tukar pembudidaya ikan (NTPi)

Sasaran Startegis -1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya					
IKU-1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
101,24	102	102,25	100,25	0,99	105	97,38

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya usaha budidayanya. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan angka indek antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

Pada bulan Januari - Desember tahun 2021 secara rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 102,83. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2021 berada di atas 100. Sementara Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) rata-rata tahun 2021 sebesar 103,19 menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian karena nilai indeksinya di atas 100. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai Tukar Pembudidaya Ikan berada pada titik terendahnya pada awal bulan dan terus naik sampai bulan Desember dengan sedikit fluktuasi. Sejalan dengan Nilai Tukar

Usaha Pembudidaya Ikan berada dalam titik terendahnya pada awal bulan pula dan mulai naik bulan selanjutnya sampai dengan Desember dengan sedikit fluktuasi. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2021 memiliki kenaikan rata-rata setiap bulannya sebesar 0,29 persen dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan Tahun 2021 memiliki kenaikan rata-rata setiap bulannya sebesar 0,28 persen



Gambar 8. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2021

Tabel 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2021

Komponen NTPi	Bulan												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
Nilai Tukar	101,26	101,52	101,42	102,55	102,91	102,16	102,35	103,01	103,87	104,59	103,82	104,47	102,83	0,29
Nilai Tukar Usaha	101,77	102,00	101,88	103,08	103,50	102,51	102,70	103,31	103,99	104,69	104,01	104,88	103,19	0,28
a Indeks Harga Diterima (It)	107,71	108,31	108,30	109,81	110,46	109,52	109,85	110,59	111,56	112,41	111,88	113,15	110,30	0,45
- Budidaya air tawar	104,65	104,98	104,86	106,06	106,87	105,67	105,86	105,80	105,72	105,48	105,12	106,22	105,61	0,14
- Budidaya laut	111,54	111,54	111,21	111,73	111,80	110,68	111,27	111,51	112,39	112,27	112,32	114,64	111,91	0,25
- Budidaya Air Payau	108,29	109,20	109,13	110,82	111,76	110,85	111,02	112,50	113,68	114,89	113,83	115,03	111,75	0,55
b Indeks harga Dibayar	106,37	106,68	106,79	107,07	107,34	107,21	107,33	107,37	107,41	107,48	107,76	108,31	107,26	0,16
- Indeks KRT	106,97	107,21	107,31	107,64	107,96	107,55	107,66	107,63	107,45	107,54	107,91	108,76	107,63	0,15
- Indeks BPPBM	105,84	106,19	106,30	106,52	106,72	106,84	106,96	107,05	107,28	107,38	107,57	107,89	106,88	0,17

Jika dilihat dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa selama tahun 2021 indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,45 persen dengan rata-rata indeks harga diterima (It) sebesar 110,30. Dari komponen penyusun It, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa indeks harga ikan air tawar mengalami kenaikan indeks harga dengan kenaikan sebesar 0,14 persen per bulan. Sementara indeks harga ikan air laut mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,25 persen per bulan dan 0,55 persen per bulan. Meningkatnya indeks harga budidaya laut dan budidaya air payau dimungkinkan semakin membaiknya tingkat permintaan ikan laut dan payau yang sebagian besar merupakan komoditas ekspor sedangkan indeks harga budidaya air tawar merupakan komoditas lokal dan harganya relative lebih murah dibandingkan komoditas air payau dan laut sehingga kenaikannya tidak sebesar komoditas payau dan laut.

Komponen penyusun Ib yang terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (KRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), masing-masing

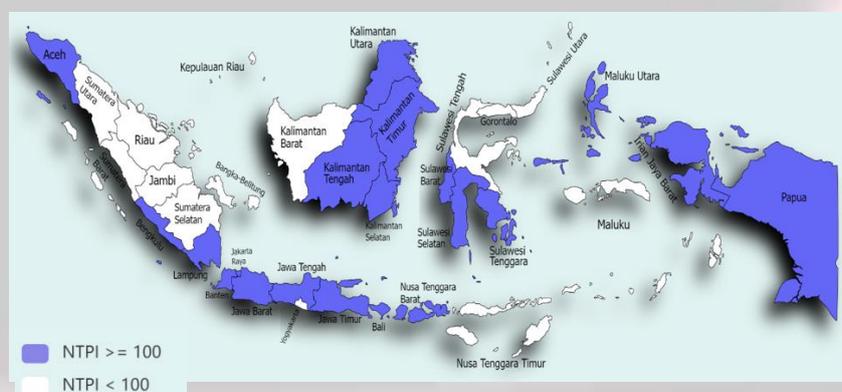
indeks rata-rata selama tahun 2021 sebesar 107,63 dan 106,88 dengan kenaikan rata-rata masing-masing sebesar 0,15 persen per bulan dan 0,17 persen per bulan. Naiknya indeks harga dibayarkan oleh pembudidaya ini diakibatkan oleh adanya desakan inflasi.

Berdasarkan wilayahnya selama periode Januari – Desember tahun 2021 terdapat 18 provinsi yang rata-rata indeks NTPI-nya di atas 100, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. NTPI rata-rata tertinggi pada Januari - September ini adalah provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 110,22 dan NTPI terendah provinsi Sumatera Barat sebesar 91,13.



Gambar 9. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2021

Sementara indeks Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) selama periode Januari - Desember tahun 2021, jumlah provinsi yang memiliki NTUPI diatas 100 relatif stabil. Secara rata-rata pada periode Januari - Desember terdapat 20 provinsi yang NTUPI-nya di atas 100 yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. NTPI rata-rata tertinggi pada Januari - Desember ini adalah provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 108,32 dan NTPI terendah provinsi Sumatera Barat sebesar 91,93. Berikut peta sebarannya:



Gambar 10. Peta Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2021

Dari gambar NTPI dan NTUPI di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi perbaikan harga di tingkat pembudidaya ikan. Hal ini dapat dilihat bahwa mulai terjadinya kenaikan indeks diterima mulai bulan Mei dan terus naik hingga bulan Desember. Sedangkan NTUPI mengalami kenaikan di bulan Mei dan terus naik sampai dengan bulan Desember. Perlu diperhatikan walaupun indeks NTPI di atas 100, kenaikan rata-rata It (0,09) lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan Ib (0,12) serta kenaikan Indeks BPPBM sebesar 0,26 per bulannya. Hal ini tentu sangat mempengaruhi nilai Indeks NTPI dan NTUPI ke depannya.

Dalam kondisi saat ini yang dapat dilakukan guna menjaga indeks NTPI dan NTUPI adalah menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Bibit/benih dan pakan adalah dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan dapat diintervensi oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Oleh karenanya kebijakan terkait bibit/benih dan pakan dapat dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Selain itu, sistem pendistribusian hasil produksi baik benih maupun ikan konsumsi juga mesti diperhatikan saat ini karena saat ini sistem transportasi menjadi kendala dengan kondisi saat ini.

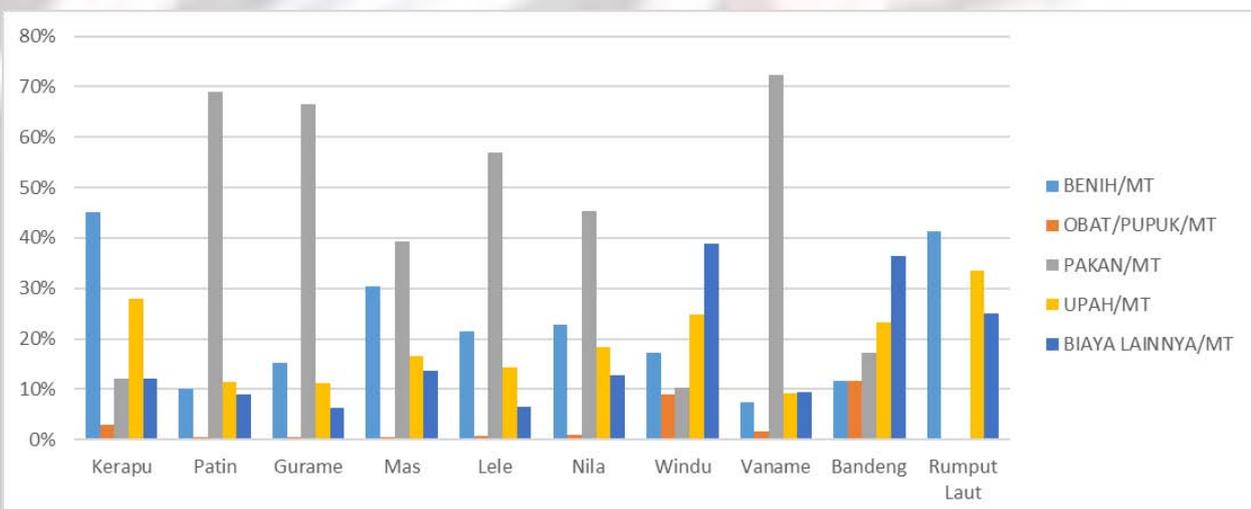
Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar pembudidaya ikan antara lain tingkat produktivitas pembudidaya ikan, usaha integrasi hulu - hilir dan pengaruh faktor lain seperti ketersediaan suplai alat-alat budidaya ikan, pakan, benih, pupuk, transportasi, ataupun infrastruktur yang mendukung pertanian, dan sebagainya

Oleh karenanya rencana aksi yang dilakukan Ditjen Perikanan Budidaya untuk peningkatan NTPI dan NTUPI diantaranya: (1) Ditjen Perikanan Budidaya mendorong program pembudidayaan ikan dengan produktivitas tinggi yaitu budidaya bioflok, budidaya minapadi; (2) pengembangan pakan mandiri dan pakan alami; (3) Bantuan bibit/benih berkualitas dan pembuatan sistem logistik benih yang memadai; (4) pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, laut; (5) pengembangan kebun bibit rumput laut; (6) pengembangan kampung-kampung perikanan budidaya; (7) inovasi, diseminasi, dan pendampingan teknologi budidaya yang modern dan berkelanjutan; (8) Kolaborasi dengan Ditjen Penguatan Daya Saing untuk ketersediaan pasar dan pengolahan ikan menjadi barang konsumsi lain; dan (9) Bersinergi dengan K/L lain dalam pembangunan pembudidayaan ikan.

IKU.2 . Rata-rata Pendapatan Pembudidaya

Sasaran Startegis -1		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya				
IKU-2		Rata-rata Pendapatan Pembudidaya				
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
3.544.244,82	3.500.000	4.412.001	126,06	24,48	3.700.000	119,24

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budidaya oleh karena itu rencana aksi yang dilakukan dalam setiap pencapaian IKU secara tidak langsung juga merupakan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, termasuk rumput laut, harga rumput laut kering dan kondisi pandemic covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan triwulan IV tahun 2021 menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan pembudidaya ikan sehingga dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2020 pendapatan pembudidaya mengalami peningkatan sebesar 24,49%, harga ikan merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, harga ikan untuk beberapa jenis ikan diindikasikan dapat menyebabkan inflasi untuk ikan hasil budidaya, ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang harganya dapat menyebabkan inflasi menurut BPS. Harga ikan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti musim, waktu panen, harga sarana produksi pembudidayaan ikan dan preferensi konsumsi masyarakat, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga ikan di masyarakat, tidak terbatas hanya pada bantuan pemerintah saja tapi bias juga dengan berbagai penguatan kelembagaan ataupun dengan promosi yang terus menerus.



Gambar 11. Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama

Secara garis besar dari grafik diatas biaya yang paling banyak digunakan sebagai biaya input pembudidayaan ikan adalah pakan rata-rata diatas 60 % kecuali untuk ikan kerapu, gurame dan udang windu, biaya pakan untuk ikan kerapu cenderung kecil karena pembudidaya kerapu masih bergantung pada ikan rucah sebagai pakan ikan kerapu sedangkan untuk ikan gurame biaya pakannya cenderung kecil karena ikan gurame juga masih mengandalkan pada ketersediaan pakan alami begitu juga untuk udang windu yang rata-rata cara budidayanya masih tradisional.

SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan

IK.3. Nilai PNBP dari Perikanan Budidaya

Sasaran Startegis -1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya					
IKU-3	Nilai PNBP dari Perikanan Budidaya					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
23,49	19,15	24,34	122,67	3,61	23,04	105,64

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumberdaya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang – undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka sumber PNBP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA)

PNBP SDA yakni PNBP yang berasal dari Pungutan Perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budidaya Perikanan.

2. PNBP Non SDA

PNBP Non SDA yakni PNBP yang berasal dari Penjualan hasil usaha budidaya dan Imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. PNBP ini terdiri dari : (i) Penjualan hasil Perikanan Budidaya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv) Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Target “Nilai PNBP dari Perikanan Budidaya” target pada tahun 2021 adalah sebesar Rp19.909.784.000 dengan realisasi mencapai Rp24.340.899.131 atau mencapai 122,26% dari target tahunan, Jika dibandingkan dengan capaian PNBP Tahun 2020 yang mencapai Rp23.490.709.140,- mengalami kenaikan sebesar 3,62%. Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2021 adalah sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021

No.	NAMA SATUAN KERJA	TARGET	REALISASI TW IV	%
1	Pusat	240,167,000	823,671,276	342.96
2	BLUPPB Karawang	1,100,764,000	1,485,733,096	134.97
3	BBPBAP Jepara	3,681,035,000	4,237,099,954	115.11
4	BBPBAT Sukabumi	1,332,540,000	1,645,695,348	123.50
5	BBPBL Lampung	1,123,950,000	1,513,373,812	134.65
6	BPBAP Situbondo	1,921,733,000	3,460,404,400	180.07
7	BPBAT Sungai Gelam Jambi	1,449,790,000	1,515,566,000	104.54
8	BPBAP Takalar	1,863,750,000	1,820,351,300	97.67
9	BPBAP Ujung Batee, DI. Aceh.	1,167,145,000	1,187,389,522	101.73
10	BPBL Batam	1,045,490,000	1,162,400,500	102.61
11	BPBAT Mandiangin/Bejuin, Kalsel.	869,685,000	1,224,304,733	117.10
12	BPBAT Tatelu Sulut.	886,300,000	1,000,037,970	114.99
13	BPBL Ambon, Maluku.	740,335,000	888,950,625	100.30
14	BPBL Lombok, NTB.	805,880,000	840,850,396	113.58
15	BP2IL Serang	548,425,000	849,809,000	105.45
16	BPIUU dan Kekerangan Karang Asem	19,909,784,000	685,261,199	124.95
TOTAL		19,909,784,000	24,340,899,131	122.26

Anggaran untuk pengelolaan PNBP sebesar Rp196.000.000 untuk kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumpulan data PNBP dan sudah terealisasi 100% (sebesar Rp196.000.000,) untuk kegiatan perjalanan dinas.

SS.3. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan

IKU 4. Tingkat kemandirian SKPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis -3	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan					
IKU-4	Tingkat Kemandirian SKPT Ditjen Perikanan Budidaya					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2020			% Pertumbuhan 2019-2020	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
3	4	3,67	91,75	22,33	4	91,75

A. SKPT Sabang

Tahun 2021, pembangunan SKPT di Kota Sabang masih menjadi indikator kinerja Direktorat Pakan dan Obat Ikan dan ditargetkan berada pada tingkat 4. Target ini bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun. Alokasi anggaran kegiatan SKPT Sabang Tahun 2021 pasca pemotongan anggaran sebesar Rp431.941.000,- (dialokasikan untuk dukungan operasional) dengan realisasi serapan sebanyak Rp427.285.650- atau capaian 98,92%. Anggaran ini telah direalisasikan untuk belanja keperluan perkantoran SKPT Sabang dan perjalanan

dinas dalam rangka pendampingan JICA. Kegiatan lain yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini, yaitu:

- a. Rapat koordinasi SKPT Sabang tidak jadi dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk kegiatan pengadaan jasa konsultan survei lokasi budidaya KJA Sabang.
- b. Menyampaikan konsep perencanaan gambar DED untuk bangunan breakwater, dermaga dan kolam labuh sebagaimana yang diminta oleh JICA Consultants guna mendapat masukan dan saran perbaikan lebih lanjut. Rekomendasi perbaikan telah disampaikan kembali oleh JICA Consultants untuk mendapat respon/perbaikan kembali dari pihak konsultan perencanaan.
- c. Target tingkat kemandirian SKPT Sabang untuk tahun 2021 tidak tercapai karena tidak ada pembangunan fisik dan pandemi Covid-19 telah menyebabkan kegiatan pengembangan SKPT terhambat termasuk kegiatan pendampingan dan koordinasi.
- d. Untuk tahun 2022, Kegiatan pengembangan SKPT Sabang lebih difokuskan kepada kegiatan penangkapan untuk kesejahteraan nelayan Sabang, sehingga perlu dilakukan pengalihan pengelolaan dari Ditjen Perikanan Budidaya kepada Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan TUSInya agar target tingkat kemandirian SKPT Sabang tahun berikutnya tercapai.

Rencana aksi untuk pencapaian indikator kinerja Tahun 2022, yaitu: (i) menyampaikan laporan hasil penyusunan dokumen pemantauan kepada Dirjen PB; (ii) menyampaikan laporan hasil survei lokasi budidaya KJA Sabang kepada Dirjen PB; (iii) approval dokumen final perencanaan (DED) dari JICA Consultants selaku pemberi hibah untuk bangunan breakwater, dermaga dan kolam labuh; (iv) Proses pengalihan pengelolaan SKPT Sabang dari Ditjen Perikanan Budidaya kepada Ditjen Perikanan Tangkap sesuai TUSI nya.

B. Sumba Timur

Pada Tahun 2021, anggaran yang ditetapkan untuk Pembangunan SKPT Kab. Sumba Timur sebesar Rp. 400.000.000,-, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi serta kegiatan monitoring dan evaluasi dengan realisasi mencapai Rp. 399.502.400,00 (99,87 %).

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang kegiatan SKPT Sumba Timur adalah Rapat Koordinasi dilaksanakan pada bulan Juni di Bogor dengan menghadirkan tim PKSPL IPB sebagai tim evaluasi SKPT Sumba Timur. Adapun hasil rapat koordinasi dengan penyampaian perkembangan, penyusunan dokumentasi dan potensi kelanjutan pelaksanaan kegiatan SKPT Sumba Timur.

C. SKPT Rote Ndao

Untuk mendukung kegiatan SKPT Rote Ndao pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp.750.000.000,- akan tetapi karena mengalami refocusing menjadi Rp 640.000.000,- yang terdiri dari Rp 390.000.000 untuk pembangunan dan Rp 250.000.000 untuk operasional sekretariat PSKPT, honor bulanan tenaga lapangan. periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021 realisasi

keuangan sebesar Rp. 629.540.000, atau sekitar 98,36 % dari pagu Rp.640.000.000,- dengan rincian untuk pembangunan mencapai Rp. 380.460.000,- atau sekitar 97,55% dari pagu Rp.390.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan pembayaran jasa konsultan perencana, pengawasan dan pelaksanaan Pembangunan Bronjong Penahan Tanah, penyediaan sumur dan instalasi air bersih dan pemeliharaan saluran keliling sedangkan untuk operasional sekitar Rp.249.080.000,- atau 99,63 % dari pagu sebesar Rp.250.000.000,- yang digunakan untuk dukungan manajemen seperti kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, biaya operasional lainnya seperti belanja bahan, honor tenaga ahli, sewa kendaraan dan biaya perjalanan dinas.

IKU 5. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan

Sasaran Strategis -3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan						
IKU-5 Percontohan Pengelolaan kluster Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan						
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
7	10	10	100	42,85	30	33,33

Model klaster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan adalah model kawasan perikanan budidaya yang prinsipnya mengatur desain dan tata letak tambak udang yang terdiri dari petak pembesaran, petak tendon dan petak reservoir yang menggunakan benih dan sarana produksi berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas tambak. Dengan model klaster ini produktivitas bisa di tingkatkan serta mengedepankan pengelolaan teknis yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan, disamping manajemen pengelolaan yang dilakukan secara kolektif.

Kegiatan percontohan pengelolaan kawasan perikanan budidaya berkelanjutan di calon kawasan budidaya perikanan pada tahun 2021 ini dianggarkan sebesar Rp. 215,74 milyar yang dialokasikan untuk 28 paket terdiri dari :

Kegiatan percontohan pengelolaan kawasan perikanan budidaya berkelanjutan di calon kawasan budidaya perikanan pada tahun 2021 ini dianggarkan sebesar Rp. 215,74 milyar yang dialokasikan untuk 28 paket terdiri dari :

1. Klaster tambak Udang sebanyak 24 paket dengan rincian: (i) BBPBAP Jepara 3 paket ; (ii) BPBAP Takalar 3 paket; (iii) BPBAP Situbondo 2 paket; (iv) BPBAP Ujung Batee 2 pakai; dan (v) BLUPPB Karawang 14 paket
2. Kluster MSF sebanyak 2 paket, dengan rincian : (i) BPBAP Situbondo 1 paket; dan(ii) BBPBL Lampung 1 paket
3. Kluster Bandeng sebanyak 2 paket, dengan rincian : (i)BBPBAP Jepara 1 paket; (ii) BPBAP Takalar 1 paket

Pada bulan Agustus terjadi refocusing anggaran untuk kegiatan cluster dimana anggaran untuk cluster ini menjadi Rp.83, 64 milyar. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan target menjadi 10 paket de dengan lokasi terdiri dari :

1. Klaster tambak Udang sebanyak 8 paket dengan rincian: (i) BPBAP Takalar 1 paket; ((ii) BPBAP Ujung Batee 2 paket; dan (iii) BLUPPB Karawang 5 paket
2. Kaluster MSF sebanyak 1 paket di BPBAP Situbondo 1 paket
3. Klaster Bandeng sebanyak 1 paket, di BPBAP Jepara

Progres pekerjaan sampai dengan Desember Tahun 2021 sudah mencapai 100%. Dengan relaisasi keuangan mencapai 99,43% atau Rp.83,17 milyar. Kegiatan cluster tambak ini dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan sudah dilaporkan di aplikasi Sismonev Kantor Staf Presiden dengan mengupload data dukung di bit.ly/KSP_KKP.

IKU 6. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

Sasaran Startegis -3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan						
IKU-6 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya						
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
75,48	72,5	86,80	119,72	14,99	80	108,5

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Pada Tahun 2021, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal 3 KKP Nomor No.1030/ITJ.3/HP.410/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 di sampaikan bahwa capaian IKU tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2020 dicapai 86,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup DJPB TA 2020

Jenis Bantuan	Jumlah		Skor Rata-rata**			Total (bobot:100)
	Bantuan	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan (bobot:80)	Integrasi (bobot:10)	Adaptasi (bobot:10)	
Bansapras Budidaya Ikan	271	254	68,33	9,70	6,20	84,23
KJA Lobster	76	73	74,18	10,00	9,86	94,04
Cluster budidaya di Masyarakat	2	2	80,00	10,00	10,00	100,00
Mesin Pakan Mandiri	12	12	78,33	10,00	6,67	95,00
DJPB	361	341	70,00	10,00	7,02	86,80

Keterangan:

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

** Skor rata-rata jenis bantuan DJPB dihitung dari rata-rata data keseluruhan jenis bantuan yang dievaluasi

Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang hanya mencapai 75,48 maka di tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 14,99%. Kenaikan ini disebabkan adanya perbaikan pelaksanaan program bantuan pemerintah sebagai tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya. Adapun perbaikan yang dilakukan diantaranya penyempurnaan Juknis pelaksanaan bantuan pemerintah.

SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

IKU 7. Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran Startegis -4		Meningkatnya produksi perikanan budidaya					
IKU-7		Produksi perikanan budidaya					
	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
		Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Ikan	6,41	7,47	5,54	74,16	-13,57	10,4	53,27
Rumput laut	9,92	10,97	9,92	90,43	0,05	12,3	80,65
Total	16,33	18,44	15,46	83,88	-5,33	22,70	68,11

Ket.***) angka Perkiraan

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 15,46 juta ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2021 yakni sebesar 19,47 juta ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 84,19 persen. Produksi perikanan budidaya tahun 2021 naik jika dibandingkan dengan produksi tahun 2020 sebesar 14,85 juta ton.

Jika dilihat selama periode 2017 – 2021, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata per tahunnya naik sebesar 0,58 persen.

Tabel 5. Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2017-2021

KOMODITAS UTAMA	VOLUME					PERTUMBUHAN (%)
	2017	2018	2019	2020	2021**	
Bandeng	701.427	875.592	824.239	811.883	960.733	8,95
Gurame	234.084	173.345	183.354	152.669	242.147	5,43
Kakap	8.432	9.583	12.503	7.973	9.034	5,30
Kerapu	70.294	16.414	13.829	9.278	14.069	18,85
Lele	1.125.526	944.779	1.086.637	993.768	1.253.114	4,13
Mas	316.649	534.215	620.831	560.669	698.371	24,95
Nila	1.280.126	1.171.236	1.317.561	1.172.633	1.491.553	5,05
Patin	319.967	373.262	380.130	327.146	509.030	15,04
Rumput Laut	10.547.552	10.320.202	9.775.986	9.618.421	9.601.435	2,30
Udang	919.988	911.857	863.119	881.599	884.939	0,93
Lainnya	559.380	308.798	309.473	274.350	727.742	27,33
Total	16.114.991	15.688.734	15.425.625	14.845.015	16.392.167	0,58

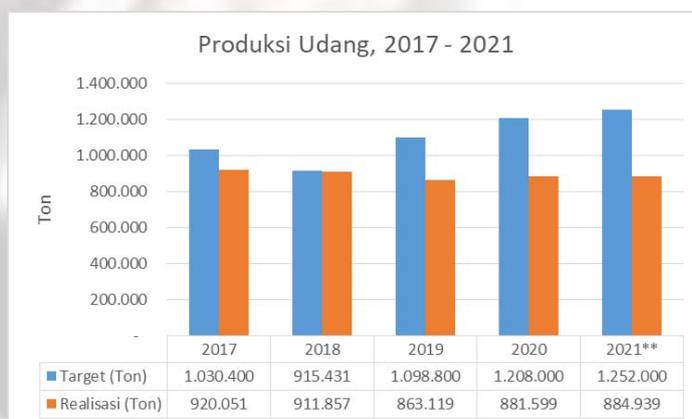
Sumber data Pusdatin

*angka sementara

**angka perkiraan

i. Udang

Perkembangan produksi udang nasional tahun 2017 - 2021 mengalami penurunan dengan penurunan rata-rata sebesar 0,93% per tahunnya. Namun pada tahun 2018 target produksi udang mencapai target sebesar 101,74 Persen. sementara tahun 2021 mencapai target sebesar 70,68%, tidak tercapainya target produksi udang ini terutama disebabkan karena terhambatnya distribusi



sarana budidaya udang terutama benih dan pakan, yang disebabkan karena antara lain pandemic covid-19 yang terjadi di tahun 2020 sampai dengan saat ini, akan tetapi keterbatasan produksi ini tidak berpengaruh terhadap pasar ekspor udang Indonesia. Pada tahun 2021 produksi udang mulai membaik kembali dan diharapkan dapat lebih baik lagi ditahun 2022 , seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budidaya udang yang diinisiasi oleh Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB). Ditjen perikanan budidaya telah dan terus mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan volume dan nilai produksi udang adalah (i) Asuransi pembudidaya yang melindungi pembudidaya dalam berusaha; (ii) Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis; (iii) Bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang; (iv) Melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral dan stakeholders lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana budidaya, serta akses pasar dan permodalan; (v) Pengembangan pola budidaya berbasis manajemen kawasan/klaster; (vi) Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha; (vii) Peningkatan input teknologi budidaya yang aplikatif, efektif

dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (viii) Pendampingan teknologi secara intensif dan massive terhadap pelaku usaha budidaya udang.

ii. Kerapu



Trend produksi ikan kerapu dari tahun 2017 - 2021 menunjukkan kinerja yang kurang positif. Hal ditandai dengan terus menurunya produksi kerapu setiap tahunnya sampai dengan tahun 2020. Namun produksi ikan kerapu pada tahun 2021 diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian. Diperkirakan produksi kerapu mencapai 14.069 ton atau tercapai targetnya sebesar 82,76 % dari target

sebesar 15.567 ton. Walaupun targetnya tidak ercapai namun diperkirakan produksi kerapu pada tahun 2021 ini naik, tidak tercapainya target karena penurunan produksi tahun sebelumnya yang disebabkan terutama karena pandemic covid-19 yang melanda negara-negara pengimpor kerapu hidup seperti Hongkong dan China. Untuk lebih memacu peningkatan produksi kerapu ini berbagai upaya telah dilakukan oleh DJPB antara lain (i) Penyediaan benih ikan kerapu yang bermutu di UPT dan unit pembenihan skala rumah tangga (HSRT); dan (ii) Adanya kebijakan program bantuan KJA budidaya ikan kerapu di beberapa daerah potensial yang memicu perkembangan kawasan budidaya kerapu di beberapa daerah potensial.

iii. Kakap

Capaian produksi ikan kakap dari tahun 2017 - 2021 sedikit mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,30% per tahun. Kakap merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang cukup digemari sebagai ikan konsumsi sehingga dengan sedikitnya produksi menyebabkan harga



ikan kakap cenderung naik. Capaian produksi ikan kakap pada tahun 2021 mencapai 82,13% dari produksi yang ditargetkan. Ketidaktercapaian target produksi ini lebih banyak karena banyak KJA yang terlambat pengisian benihnya. Selain itu semakin banyak masyarakat yang mengusahakan tambak intensif sehingga lahan tambak tradisional yang hasil sampingannya berupa ikan kakap semakin sedikit dan secara tidak langsung berdampak pada produksi ikan kakap itu sendiri. Untuk lebih meningkatkan produksi ikan kakap DJPB telah

mengalokasikan bantuan berupa KJA laut dan pengembangan benih kakap di beberapa UPT pusat untuk mendukung budidaya kakap di KJA laut.

iv. Bandeng



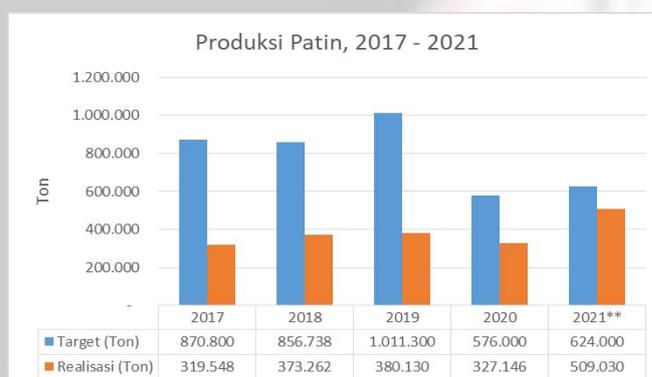
Perkembangan produksi bandeng dari tahun 2017 - 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,95%. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 karena pandemic namun diperkirakan akan naik kembali pada tahun 2021. Namun Selama kurun waktu tahun 2017 - 2021 produksi bandeng belum pernah tercapai. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh terbatasnya sentra

produksi benih bandeng walaupun berbagai teknologi diversifikasi olahan bandeng yang menyebabkan minat masyarakat akan produk bandeng tetap tinggi. Indikasi masih adanya ekspor nener juga menyebabkan ketersediaan nener dalam negeri semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk mencapai angka yang ditargetkan.

Untuk kembali dapat meningkatkan produksi bandeng dan mencapai target produksinya, upaya yang telah dilakukan Ditjen perikanan budidaya dengan beberapa langkah kebijakan strategis yang akan dilakukan antara lain : a) Membentuk model penerapan industrialisasi bandeng sebagai upaya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha budidaya bandeng pada kawasan-kawasan potensial; b) Pengembangan broodstock bandeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih berkualitas di sentral-sentral produksi; c) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; d) Menggandeng Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), yang dalam hal ini diposisikan sebagai partner Pemerintah khususnya dalam mendorong implementasi kebijakan industrialisasi bandeng. Langkah-langkah di atas akan terus di dorong sehingga capaian volume dan nilai produksi periode 2020-2024 akan mampu tercapai.

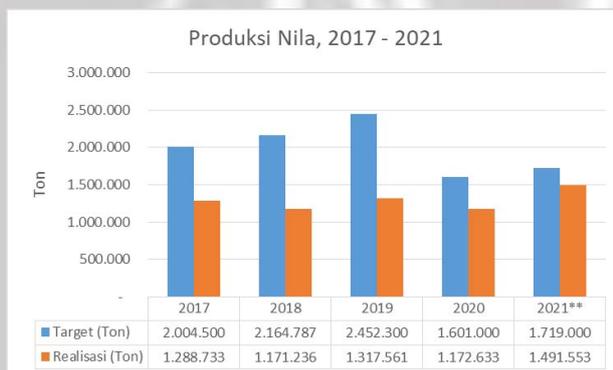
v. Patin

Produksi ikan patin dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,04%. Volume produksi pada kurun waktu tersebut masih belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam renstra dengan capaian pada tahun 2021 terhadap target sebesar 81,56%. Belum tercapainya produksi ikan patin di tahun 2021 antara lain disebabkan karena masih sulitnya memasarkan ikan patin mengingat ikan patin merupakan ikan yang masih belum bisa diterima oleh semua etnik di Indonesia,



ikan patin terutama banyak disukai di daerah Kalimantan dan Sumatera bagian Selatan sementara itu di pulau Jawa yang merupakan potensi untuk pemasaran penduduknya masih kurang menyukai ikan patin. Disisi lain permasalahan tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan tidak sebanding dengan harga yang berlaku di pasaran, sehingga secara ekonomis tingkat efisiensi masih cukup rendah ditambah lagi dengan adanya pandemic covid-19. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan budidaya ikan patin melalui kerjasama sinergi, baik lintas sektoral, swasta maupun stakeholders lain, untuk menjamin ketercapaian produksi ikan patin di tahun kedepan. Kerjasama tersebut diarahkan dalam rangka : (i) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas terutama pasar luar negeri seperti pada negara-negara yang banyak tenaga kerja indonesianya seperti Arab Saudi dan daerah timur tengah lainnya; (ii) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien; (iii) Pengembangan kawasan budidaya ikan patin secara terintegrasi, serta (iv) Peningkatan nilai tambah produk menjadi hal mutlak dan terus dilakukan yaitu melalui pengembangan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan patin dan pengembangan unit pengolahan ikan patin. Melalui upaya diatas, maka secara langsung akan mampu memberikan jaminan terhadap jalannya siklus bisnis yang positif dan berkesinambungan; (v) Mendorong peningkatan konsumsi ikan patin terutama daerah di luar Sumatera dan Kalimantan.

vi. Nila



Produksi ikan nila dari tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata kenaikan 5,05%. Dilihat dari trend capaian produksi terhadap target tahunan menunjukkan bahwa angka produksi nila sampai dengan tahun 2021 belum dapat dicapai. Namun, capaian pada tahun 2021 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya

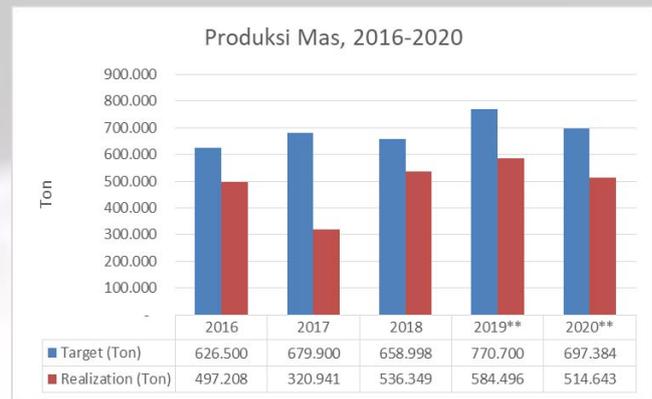
mencapai 86,77% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi geliat pembudidayaan ikan nila di daerah.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target volume produksi pada kurun waktu tersebut, antara lain dikarenakan secara umum kapasitas usaha yang dijalankan pembudidaya masih dalam skala kecil, juga adanya kegiatan rasionalisasi jumlah KJA baik di sungai atau danau juga turut mempengaruhi capaian produksi ikan nila.

Rencana aksi dalam upaya pencapaian kinerja antara lain melalui (i) Pengembangan gerakan minapadi, (ii) Pengembangan budidaya ikan nila melalui intensifikasi dengan Bioflok dan Running Water; (iii) Mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan secara mandiri yang berkualitas; (iv) Ekstensifikasi pada kawasan potensial; serta (v) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas.

vii. Ikan Mas

Produksi ikan mas menunjukkan kenaikan selama tahun 2017 - 2021 mengalami kenaikan sebesar 24,95% dengan kenaikan tertinggi pada kurun 2017-2018. Namun target produksi belum mencapai target. Belum tercapainya target produksi ikan mas terutama disebabkan merebaknya berbagai penyakit ikan yang menyebabkan tingkat produktifitas menurun.



Pencapaian target produksi ikan mas pada beberapa tahun belakangan ini dan tahun-tahun ke depan mengalami tantangan dengan adanya kebijakan zero kja dan beberapa daerah telah menerapkan kebijakan ini sehingga peningkatan produksi ikan mas mengalami kendala pandemic covid-19 juga secara nyata telah memberikan pengaruh negative terhadap pertumbuhan produksi ikan mas. Namun Ditjen perikanan budidaya tetap berupaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dan dalam upaya pencapaian target volume produksi tersebut, maka dilakukan upaya-upaya yang secara langsung mendorong peningkatan efisiensi produksi, diantaranya : (i) Intensifikasi melalui pengembangan teknologi baik budidaya maupun aspek nutrisi (pakan) yang berkualitas berbasis bahan baku lokal; (ii) Pengembangan kapasitas usaha dengan dukungan penguatan modal bagi usaha skala kecil melalui penguatan kemitraan usaha; (iii) Perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah; dan (iv) pengembangan budidaya ikan dikombinasikan dengan lahan padi atau minapadi

viii. Lele

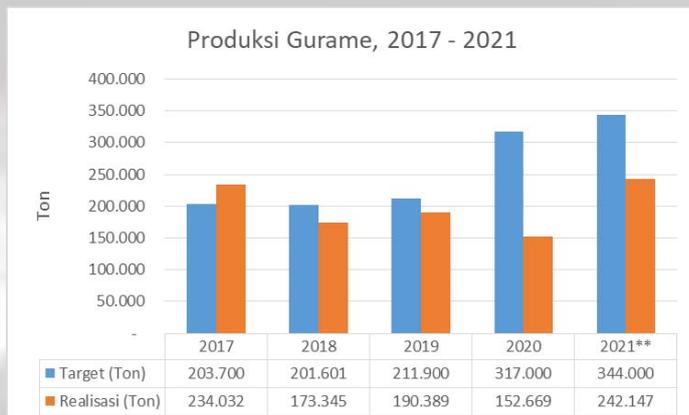
Selama kurun waktu tahun 2017-2021 produksi ikan lele menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 4,13%. Produksi ikan lele selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Namun di tahun 2021 diperkirakan produksinya naik karena efek pandemic mulai berkurang dan untuk lele yang bisa dibudidayakan dengan mudah ini



memiliki satu kekuatan yaitu, untuk memenuhi lebutuhan lokal dengan adanya hasil positif selama beberapa tahun terakhir maka untuk mempertahankan pencapaian produksi lele di tahun selanjutnya, beberapa kegiatan yang perlu diteruskan adalah sebagai berikut: (i) Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok untuk efisiensi pakan; (ii) Penggunaan teknologi budidaya ikan lele dengan terpal sebagai upaya efisiensi pemanfaatan lahan; (iii) Efisiensi pakan melalui

bantuan gerakan pakan mandiri; dan (iv) pembangunan pabrik pakan guna memenuhi kebutuhan pakan yang berkualitas dan terjangkau.

ix. Gurame



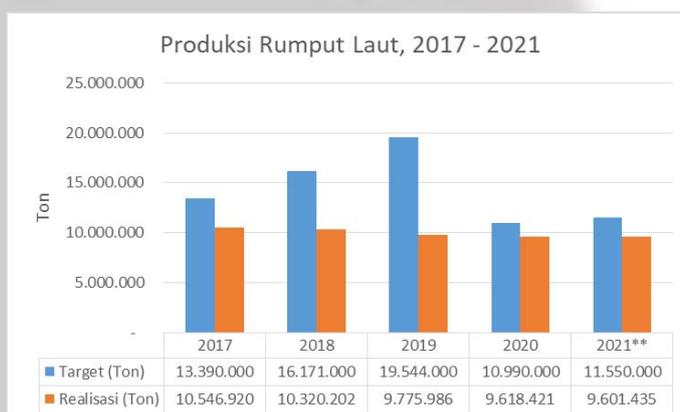
Produksi gurame tahun 2017 - 2021 menunjukkan kinerja yang positif, dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 5,43%. Angka capaian produksi tahun 2021 belum target produksi dengan capaian sebesar 70,39%. Namun produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2021 ini. meningkatnya produksi ini terutama disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup

tinggi dan pemasarannya yang masih cukup terbuka. Produksi gurame masih didominasi pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan disisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena proses produksi budidaya yang cukup lama dan semakin sedikitnya ketersediaan pakan alami untuk gurame yang disebabkan karena banyaknya alih fungsi lahan, karena gurame merupakan salah satu ikan yang mengkonsumsi pakan alternatif seperti daun talas ataupun pakan alternatif lainnya.

Pengembangan pola usaha berbasis segmentasi merupakan langkah yang tepat karena secara nyata mampu memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Percepatan pengembangan kawasan melalui pendekatan pola segmentasi usaha diharapkan akan mampu menarik minat masyarakat untuk terjun melakukan usaha budidaya gurame.

x. Rumput Laut

Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dimana secara nasional produksi rumput laut memberikan *share* sebesar 60% terhadap produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi rumput laut dari tahun 2017 - 2021 menunjukkan trend yang negatif



dengan rata-rata penurunan sebesar 2,30%. Penurunan ini disebabkan terutama karena beberapa sentra rumput laut mulai jenuh yang disebabkan kualitas bibit yang semakin menurun sehingga kurang tahan terhadap kondisi lingkungan dan cepat terserang penyakit, sementara itu produksi bibit rumput laut kultur jaringan belum bisa menjangkau seluruh wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia.

walaupun mengalami penurunan produksi pada selama 5 tahun terakhir akan tetapi rumput laut tetap sebagai penyumbang utama pada total produksi perikanan budidaya, beberapa hal yang mendasari tingginya pencapaian komoditas ini karena budidaya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan yang cukup singkat yaitu 45 hari per siklus sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat, serta cara budidaya yang mudah. Rumput laut juga cocok untuk dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah yang merupakan salah satu ciri dari daerah yang masyarakat ekonominya digolongkan bawah. Keuntungan lainnya adalah modal kerja yang relatif kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan bahan baku untuk beberapa industri, seperti biofuel, agar-agar, caragenan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga terus menerus melakukan upaya terobosan diantaranya adalah pengembangan industrialisasi rumput laut di sentra-sentra penghasil rumput laut. Rumput laut Indonesia didominasi spesies *Gracilaria spp* dan *Eucheama cottonii*. Namun beberapa beberapa tahun terakhir mulai berkembang komoditas *Eucheama spinosum* dan *Caulerpa sp*.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya
- Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan broodstock center : i) Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname “Global Gen”, Ikan Batak “Tor Soro”, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua, Udang Windu Domestikasi); ii) Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul (GAUL); iii) Penyusunan regulasi dan perbanyak protokol induk ikan unggul; serta iv) Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan.
- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan; (iv) Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda.
- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama: (i) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi; (ii) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum; (iv) Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak; (v) Pemberdayaan

- pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi; (vi) Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya di Kab/Kota Minapolitan/Industrialisasi; dan (vii) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekskavator dan mesin pellet
- Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan
 - Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, dengan terobosan utama adalah (i) Pembangunan Posikandu (Pos Pelayanan Ikan Terpadu); (ii) Pengembangan *National Residu Monitoring Plan* (NRMP) yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat kimia dan bahan biologis lainnya; dan (iii) Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit ikan.
 - Pengawasan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

IKU 8. Produksi Ikan Hias

Sasaran Startegis -4	Meningkatnya produksi perikanan budidaya					
IKU-8	Produksi ikan Hias (milyar ekor)					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2019-2020	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
1,49	1,98	1,47	74,08	-1,63		62,17

Realisasi volume produksi ikan hias Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1,49 miliar ekor atau mencapai 79,99% dari target sebesar 1,8 miliar ekor. Sementara pada tahun 2021 produksi ikan hias ditargetkan sebesar 1,87 miliar ekor dan tercapai sebesar 1,47 miliar ekor dengan prosentase capaian sebesar 74,08 persen. sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi ikan hias mengalami penurunan sebesar 1,63 %.

Penurunan produksi ikan hias pada tahun 2021 sebesar 1,63 % ini masih sedikit dipengaruhi oleh pandemic covid-19, dan ekspor ikan hias di masa pandemic ini mengalami tantangan yang cukup besar, khususnya terkait dengan ketersediaan dan kenaikan harga biaya logistik pengiriman ikan hias ke negara tujuan ekspor. Akibatnya nilai ekspor ikan hias pada triwulan 1 dan 2 tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi pada triwulan 3 dan 4 ekspor ikan hias mengalami kenaikan di akhir tahun 2020 (suhana.web,id), kondisi ekspor ini ada beberapa pembudidaya ikan hias yang sedikit mengurangi kegiatan produksinya sehingga secara produksi ikan hias turun dibandingkan tahun 2020 dan ekspor ikan hias tahun 2021 ini di harapkan meningkat sering dengan membaiknya kondisi pandemic covid-19. Keuntungan budidaya ikan hias yaitu tidak memerlukan lahan yang luas sehingga siapapun dapat membudidayakan ikan hias namun nilai yang dihasilkan ikan hias jauh lebih besar dibandingkan dengan ikan konsumsi. Selain itu perputaran uang di ikan hias lebih cepat dibandingkan dengan ikan konsumsi sehingga tingkat pengembalian modalnya pun lebih cepat dibandingkan dengan ikan konsumsi.

Tabel 6. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Tahun 2021 **

KOMODITAS	TARGET	REALISASI
Koi	580.289	458.059
Mas Koki	39.379	37.517
Arwana	14.860	3.005
Botia	20,902	23.724
Cupang	255.723	189.968
Oscar	6.232	12.783
Discus	13.129	22.600
Manfis	56.655	54.439
Plati	71.683	44.168
Moly	87.535	89.807
Gapi	72.871	63.053
Corydoras	15.976	11.585
Nemo	347	2.722
Kuda Laut	7	43.119
Banggai Cardinalish	46	13.182
Blue Devil/Betok Ambon	39	13.182
Lainnya	753.098	390.280
TOTAL	1.988.722	1.73.191

Keterangan: **) angka sangat sementara

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJPB dalam rangka meningkatkan produksi ikan hias dan kepada masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan hias adalah dengan mengadakan pembinaan kepada pembudidaya ikan hias. Ditahun 2021, untuk mendukung peningkatan produksi ikan hias, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah mengalokasikan anggaran untuk mengadakan 28 paket bantuan induk (ikan koi dan komet).

SS.5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Partisipatif

IKU 9. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor

Sasaran Startegis -5		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang partisipatif					
IKU-9		Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor					
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
		Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
Bidang Kawasan dan kesehatan Ikan	5.178	5117	5.263	102,85	1,64	26000	21,05
Bidang Produksi dan Usaha	2,136	1505	1541	102,39	-27,85	4,000	38,52
Bidang Perbenihan	182	125	155	124,00	-14,83	500	31,00
Bidang pakan dan Obat ikan	123	100	148	148,00	20,32	230	64,35
TOTAL	7.619	6.847	7.107	103,80	-6,72	30.730	23,13

Terdapat perbedaan target pada Indikator Kinerja pengujian residu perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor dimana pada Renstra DJPB ditetapkan sebesar 17.885 paket sementara di dalam PK Level 1 ditetapkan sebesar 9.340 paket. Perbedaan ini terjadi karena pada saat trilateral meeting penyusunan anggaran penetapan anggaran awal Tahun 2022 yang hanya cukup untuk 9.340 paket saja ditambah adanya refocusing di bulan Agustus menyebabkan adanya penyesuaian target lagi menjadi 6.847.

Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor ini adalah salah satu program DJPB dalam rangka terjaminnya mutu dan kualitas produksi perikanan budidaya. Jika dibandingkan secara jumlah maka capaian Indikator ini turun sampai dengan 6,7% tetapi jika dibandingkan dengan prosentase capaian IKU, Capaian nya mengalami kenaikan dimana di tahun 2020 tercapai 102,26 % sementara di Tahun 2021 mencapai 103,80% dari target.

Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan

A. Monitoring Residu

Kegiatan pengendalian residu tahun 2021 merupakan kegiatan rutin dalam rangka memastikan bahwa penerapan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan global. Pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Nomor: 37/PerMen-KP/2019 tentang pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi yang dilaksanakan berdasarkan rencana monitoring residu nasional (RMRN) atau National Residue Monitoring Plan (NRMP).

RMRN memuat perencanaan monitoring residu untuk periode 1 (satu) tahun, diantaranya: target lokasi, jenis komoditas, jumlah sampel, substansi uji, dan laboratorium Acuan & Pengujian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Lokasi pengambilan sampel tahun 2021 mengalami penambahan di 6 provinsi, yaitu : Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah dan Gorontalo. Dengan demikian, terdapat 25 (dua puluh lima) Provinsi sebagai Pelaksana Monitoring Residu, yaitu: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

Target sampel tahun 2021 ditetapkan sebanyak 7.840 sampel ikan/udang yang diambil dari unit pembesaran ikan dengan jenis komoditas yaitu: udang, bandeng, nila, patin dan lele. Namun, dikarenakan adanya refocusing anggaran tahun 2021 menyebabkan target sampel mengalami penyesuaian menjadi 4.096 sampel. Penetapan target sampel mempertimbangkan jumlah produksi nasional perikanan budidaya pada tahun sebelumnya di 25 (dua puluh lima) Provinsi dengan ketentuan setiap 100 (seratus) ton sampel diambil 1 (satu) sampel.

Perolehan capaian jumlah sampel pengujian residu dilakukan berdasarkan sampel yang dilakukan pengujian di laboratorium yang telah ditetapkan Keputusan

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No 89/Kep-DJPB/2021 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2021. Capaian jumlah sampel residu tahun 2021 sebanyak 4.186 sampel atau 102,21% dari target (4.096 sampel).

Tabel 7. Realisasi Jumlah Sampel Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya Tahun 2021

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	(%)
1	Aceh	Udang	176	176	100,00
2	Sumatera Utara	Udang	111	120	108,10
		Nila	45	45	100,00
3	Sumatera Barat	Nila	66	66	100,00
4	Riau	Patin	55	55	100,00
5	Jambi	Patin	30	35	116,67
6	Sumatera Selatan	Udang	74	74	100,00
		Patin	40	40	100,00
7	Bengkulu	Udang	63	63	100,00
8	Lampung	Udang	165	179	108,48
9	Banten	Udang	21	21	100,00
10	Jawa Barat	Udang	317	317	100,00
		Lele	78	78	100,00
		Nila	57	57	100,00
11	Jawa Tengah	Udang	102	108	105,88
		Nila	50	50	100,00
12	DI Yogyakarta	Udang	37	43	116,21
13	Jawa Timur	Udang	439	439	100,00
		Bandeng	262	262	100,00
		Nila	141	141	100,00
		Lele	312	352	112,82
14	Bali	Udang	36	36	100,00
15	Nusa Tenggara Barat	Udang	295	295	100,00
16	Kalimantan Barat	Udang	49	49	100,00
17	Kalimantan Selatan	Udang	123	123	100,00
18	Kalimantan Tengah	Udang	34	34	100,00
19	Kalimantan Timur	Udang	87	92	105,74
20	Kalimantan Utara	Udang	64	69	107,81
21	Sulawesi Tenggara	Udang	220	220	100,00
22	Sulawesi Tengah	Udang	115	115	100,00
23	Sulawesi Selatan	Udang	199	199	100,00
		Bandeng	81	81	100,01
24	Sulawesi Barat	Udang	83	83	100,02
25	Gorontalo	Udang	69	69	100,03
Jumlah			4,096	4,186	102,19

Pengujian sampel pada tahun 2021 dilakukan di 16 (enam belas) laboratorium pengujian yang termasuk pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No 89/Kep-DJPB/2021 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2021, meliputi: PT SGS Indonesia, PT Mutu Agung Lestari, PT Angler Bio Chem Lab, PMHP Medan, PMP2KP Surabaya, PMP2KP Banyuwangi, UPT Lab Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan, ULMPPHP Kalimantan Barat, BUSKIPM, BMHP Kalimantan Selatan, BBPBAP Jepara, BBPBAT Sukabumi, BPBAP Situbondo, BBPBL Lampung, BPKIL Serang dan PPISHP DKI Jakarta.

Hasil pengujian residu terhadap 4.186 sampel ditemukan potensi kandungan residu atau PNC (*Potentially Non Compliance*) sebanyak 34 (tiga puluh empat) sampel yang

berasal dari Jawa Barat (13 sampel), Jawa Timur (19 sampel), Kalimantan Selatan (1 sampel) dan Sulawesi Tengah (1 sampel). Terhadap sampel yang PNC tersebut selanjutnya dilakukan uji konfirmasi dan ditemukan 8 (delapan) sampel *non compliance* (NC) untuk parameter enrofloxacin dari Provinsi Jawa Timur sedangkan 26 (dua puluh enam) sampel lainnya memberikan hasil *compliance*. Dengan demikian, hasil uji *non compliance* ditemukan 8 sampel dari total capaian sampel yang menunjukkan bahwa 99,81% sampel yang monitoring bebas residu, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Data Sampel Pengujian Sampel Non Compliance Tahun 2021

No	Kabupaten	Komoditas	Jumlah Sampel	Parameter	Hasil Uji	Laboratorium
1	Pasuruan	Lele	4	Enrofloxacin	244 µg/kg	PT Angler BioChem Lab
				Enrofloxacin	247 µg/kg	PT Angler BioChem Lab
				Enrofloxacin	663 µg/kg	PT Angler BioChem Lab
				Enrofloxacin	798 µg/kg	PT Angler BioChem Lab
3	Ngawi	Lele	1	Enrofloxacin	153 µg/kg	PT Angler BioChem Lab
4	Nganjuk	Lele	2	Enrofloxacin	347 µg/kg	PT Angler BioChem Lab
				Enrofloxacin	423 µg/kg	PT Angler BioChem Lab
5	Sidoarjo	Lele	1	Enrofloxacin	288 µg/kg	PT Angler BioChem Lab

Dengan ditemukannya kandungan residu pada sampel pada 8 sampel diatas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah melakukan tindakan investigasi termasuk *resampling* pada unit budidaya yang diketahui *Non Compliance*.

b. Monitoring dan Surveillance Hama dan Penyakit Ikan

Target indikator kinerja lokasi kawasan budidaya yang penyakitnya dimonitoring dan disurveilan (kab/kota) pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) sampel, akan tetapi pada triwulan 3 mengalami penyesuaian jumlah sampel menjadi 1.021 (seribu dua puluh satu) sampel dikarenakan adanya refocusing (pemotongan) anggaran dekonsentrasi. Berikut merupakan capaian jumlah sampel surveilan dan/ monitoring Tahun 2021.

Tabel 9. Realisasi Jumlah Sampel Monitoring dan Surveilance Penyakit Ikan Tahun 2021

No	Provinsi	Komoditas	Penyakit	Target Sampel	Realisasi
1	Aceh	Udang	WSSV	30	30
2	Sumatera Utara	Udang	AHPND, WSSV	53	20
3	Sumatera Barat	Nila	MAS	68	53
4	Riau	Udang, mas, nila, lele, patin, dan gurame	MAS, ESC, Vibriosis, dan Ichtyophthiriasis	30	35
5	Kepulauan Riau	Kerapu, kakap putih, dan bawal bintang	RSIV, VNN, dan vibriosis	45	72
6	Jambi	Lele, patin, dan mas	MAS dan Ichtyophthiriasis	23	37
7	Sumatera Selatan	Patin dan Nila	MAS, ESC, dan TiLV	30	16
8	Kepulauan Bangka Belitung	Patin dan Nila	MAS, ESC, dan TiLV	60	8

No	Provinsi	Komoditas	Penyakit	Target Sampel	Realisasi
9	Bengkulu	Nila, lele, dan mas	MAS dan S.agalactiae	15	26
10	Lampung	Udang	WSSV	35	3
11	Banten	Nila, lele, dan mas	MAS dan S.agalactiae	8	0
12	DKI Jakarta	Nila, lele, dan mas	MAS, KHV, ESC, dan S.agalactiae	23	127
13	Jawa Barat	Koi, lele, nila, dan mas	MAS dan S.agalactiae	80	80
14	Jawa Tengah	Udang, gurame, koi, dan lele	WSSV, AHPND, KHV, dan MAS	81	60
15	DI Yogyakarta	Nila dan lele	MAS	38	44
16	Jawa Timur	Udang, nila, mas, dan lele	WSSV, AHPND, KHV, dan MAS	15	131
17	Bali	Udang	AHPND	15	10
18	Nusa Tenggara Barat	Udang, nila, lele, dan rumput laut	WSSV, IMNV, AHPND, TiLV, dan ice ice	30	14
19	Nusa Tenggara Timur	Udang dan rumput laut	WSSV dan ice ice	15	22
20	Kalimantan Barat	Udang, nila, lele, dan mas	WSSV dan MAS	23	24
21	Kalimantan Tengah	Udang, nila, patin, dan lele	WSSV dan MAS	23	23
22	Kalimantan Selatan	Udang	WSSV, IMNV, EHP, dan AHPND	38	11
23	Kalimantan Timur	Udang	WSSV	15	34
24	Kalimantan Utara	Udang	WSSV	45	34
25	Sulawesi Tenggara	Udang	WSSV	15	23
26	Sulawesi Tengah	Udang, mas, nila, gurame, dan rumput laut	WSSV, MAS, KHV, dan S.agalactiae	15	15
27	Sulawesi Selatan	Udang, mas, nila, lele, dan rumput laut	WSSV, AHPND, EHP, IMNV, MAS, dan ice ice	10	58
28	Sulawesi Barat	Udang	WSSV	15	9
29	Gorontalo	Udang	WSSV	45	21
30	Sulawesi Utara	Udang	WSSV	15	4
31	Maluku	Rumput laut	Ice-ice	15	6
32	Maluku Utara	Udang, kerapu, dan nila	WSSV, VNN, dan TiLV	23	19
33	Papua	Lele	MAS	15	2
34	Papua Barat	Nila dan lele	MAS	15	6
				1021	1077

Berdasarkan realisasi diatas, diketahui bahwa meskipun capaian telah melampaui target yang ditetapkan namun 19 Provinsi belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Hal tersebut dikarenakan pengambilan sampel hanya dengan uji klinis namun tidak diuji secara laboratoris dan adanya kenaikan harga uji berdasarkan PP 85 Tahun 2021 tentang PNPB yang berdampak pada tidak seluruh sampel dapat diuji.

Pada Triwulan IV berdasarkan hasil laporan dari Dinas KP Provinsi yang disampaikan melalui Software Sistem Monitoring Penyakit Ikan (SSMPI), maka ditemukan 13 (tiga belas) penyakit ikan pada beberapa provinsi sebagai berikut:

1. *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) ditemukan di 19 Provinsi;
2. *Infectious Myonecrosis Virus* (IMNV) ditemukan di 2 Provinsi;
3. *Enterocytozoon Hepato Penaeid* (EHP) ditemukan di 2 Provinsi;
4. *Motil Aeromonas Septicemia* (MAS) ditemukan di 18 Provinsi;
5. *Ichtyophthiriasis* ditemukan di 2 Provinsi;
6. *Vibriosis* ditemukan di 1 Provinsi;
7. *Koi Herpes Virus* (KHV) ditemukan di 4 Provinsi;
8. *S. agalactiae* ditemukan di 5 Provinsi;
9. *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (AHPND) ditemukan di 7 Provinsi;
10. *Viral Encephalopathy and Retinopathy* (VER)/Viral Nervous Necrosis (VNN) ditemukan di 2 Provinsi;
11. *Tilapia Lake Virus* ditemukan di 3 Provinsi;
12. *Enteric Septicemia of Catfish* ditemukan di 4 Provinsi.
13. RSIV ditemukan di 1 Provinsi

Penyakit WSSV merupakan penyakit yang paling sering dijumpai pada budidaya ikan air tawar, namun demikian tingkat serangannya ringan dan masih dapat dikendalikan. Penggunaan anggaran yang diperuntukkan capaian IKU Jumlah Sampel Surveilans dan/atau Monitoring sebesar Rp 388.237.800 dari alokasi pagu Rp 388.541.000 atau sebesar 99,92%.

Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang Produksi dan Usaha Budidaya

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM-KHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik.

Penerapan CBIB oleh unit pembudidayaan ikan tersebut dilakukan dengan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta biologis. Selanjutnya unit pembudidayaan ikan dapat diberikan Sertifikat CBIB setelah menerapkan dan memenuhi kriteria dan persyaratan CBIB.

Tujuan kegiatan CBIB adalah untuk (i) meningkatkan pemahaman pembudidaya akan SNI CBIB dan penerapannya; (ii) meningkatkan kesiapan unit budidaya mengikuti sertifikasi SNI CBIB; dan (iii) meningkatkan performa pembudidaya ikan Indonesia dalam memenuhi persyaratan perikanan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

Capaian sertifikasi CBIB tahun 2021 sejumlah 1,541 sertifikat yang berasal dari unit produksi budidaya yang tersebar di 34 Provinsi. Sebaran realisasi sertifikasi CBIB tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 10. Realisasi Sertifikasi CBIB Tahun 2021

No	Provinsi	Target (unit)	Realisasi (unit)	Persentase (%)
1	Aceh	45	49	108,89
2	Sumatera Utara	20	31	155,00
3	Sumatera Barat	30		-
4	Bengkulu	30	57	183,33
5	Riau	43	86	200,00
6	Kepulauan Riau	30	87	290,00
7	Jambi	40	1	2,50
8	Sumatera Selatan	60	50	83,33
9	Bangka Belitung	40		-
10	Lampung	94	85	90,43
11	Banten	17	37	217,65
12	DKI	20	17	85,00
13	Jawa barat	100	42	41,00
14	Jawa Tengah	120	38	31,67
15	DIY	30	12	40,00
16	Jawa Timur	115	119	103,48
17	Bali	30	37	123,33
18	NTB	80	96	118,75
19	NTT	30	27	90,00
20	Kalimantan Barat	40	87	217,50
21	Kalimantan Tengah	40		-
22	Kalimantan Timur	50	52	104,00
23	Kalimantan Utara	39	6	15,38
24	Kalimantan Selatan	35	9	25,71
25	Sulawesi Utara	17	60	352,94
26	Sulawesi Selatan	50	27	54,00
27	Sulawesi Tengah	60	168	280,00
28	Gorontalo	50	134	268,00
29	Sulawesi Tenggara	50	90	180,00
30	Sulawesi Barat	25	36	144,00
31	Maluku Utara	35		-
32	Maluku	10	1	10,00
33	Papua	20		-
34	Papua Barat	10		-
TOTAL	1.505	1.541	102,39	

Sumber : Hasil Rekapitulasi Data Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Dukungan anggaran kegiatan sertifikasi CBIB sebesar Rp. 1.105.282.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.102.189.500 (99,72%).

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi CBIB antara lain:

1. Tidak ada organisasi khusus yang menangani CBIB, tidak ada fungsi standardisasi dan sertifikasi di unit kerja DJPB pusat
2. Belum terwujudnya penetapan legalitas/kebijakan CBIB peralihan versi 1 (Kep MKP 02/2007 tentang CBIB yang memfokuskan keamanan pangan), menjadi versi 2 (SNI CBIB yang mencakup keamanan pangan, kesehatan dan

- kesejahteraan ikan, tanggung jawab lingkungan dan sosial ekonomi), karena dukungan unit kerja lain lingkup DJPB & KKP
3. Terdapat mutasi personil/ petugas CBIB baik pusat maupun di daerah
 4. Terbatasnya personil yang menangani CBIB dan pekerjaan tambahan lainnya yang di membebani tugas utama personil yang menangani CBIB.

Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya dan Sertifikasi untuk Ekspor Bidang Perbenihan

Pengujian residu produk perikanan dan sertifikasi ekspor bidang perbenihan yang pelaksanaan dan capaian ikunya dilakukan dengan melaksanakan sertifikasi CPIB, hal ini dikarenakan adanya tuntutan pembudidaya terhadap benih bermutu dapat dipenuhi dengan penyediaan benih bermutu oleh unit pembenihan. Benih bermutu dapat dihasilkan dari induk unggul dan proses pembenihan yang memenuhi persyaratan SNI Perbenihan Perikanan, manajemen mutu, keamanan pangan dan ramah terhadap lingkungan.

Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik oleh unit pembenihan harus didorong melalui sosialisai dan pembinaan penerapan CPIB. Unit pembenihan yang menerapkan CPIB dilakukan penilaian sertifikasi CPIB untuk menentukan kesesuaian penerapan yang dilakukan terhadap persyaratan SNI Perbenihan, Manajemen Mutu, Keamanan Pangan dan Lingkungan. Penilaian Sertifikasi CPIB dilakukan oleh auditor CPIB terhadap unit pembenihan yang telah dilakukan pembinaan dan memiliki personil bersertifikat MPM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Realisasi keuangan sebesar Rp.471.389.650,- atau sekitar 99,98 % dari total anggaran Rp. 471.477.000,- sedangkan untuk capaian fisik jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB komoditas ekspor mencapai 155 unit atau tercapai 124 % dari target 125 unit, daftar unit seperti terlihat dalam lampiran 1. Sedangkan capaian terhadap target tahunan yang semula 250 unit karena mengalami refocusing menjadi 125 unit prosentase capaiannya sebesar 124%. Apabila kita bandingkan antara capaian yang sama pada tahun sebelumnya secara prosentase mengalami kenaikan tetapi secara jumlah mengalami penurunan, kondisi ini dikarenakan pada tahun 2021 dimasa pandemi covid 19 terjadi perubahan target sertifikasi yang semula 250 unit menjadi 125 unit yang diakibatkan refocusing anggaran.

Tabel 11. Jumlah Unit Sertifikasi dan Jumlah Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik Yang terbit Tahun 2021

Jml Unit	Jml Stfkt	Nama Unit Pembenihan (<i>Hatchery Name</i>)	Komoditas (<i>Comodity</i>)	Provinsi (<i>Province</i>)
1	1	CV. Putra Bahari Milk Fish Bali	Ikan Bandeng	Bali
2	2	UPT- Benih Ikan (BI) Kelansin	Ikan Tambakan	Kalimantan Barat
	3	UPT- Benih Ikan (BI) Kelansin	Ikan Tengadak	Kalimantan Barat
3	4	UPTD Pengembangan Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Unit I Sempu	Ikan Nila	DI Yogyakarta
	5	UPTD Pengembangan Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Unit I Sempu	Ikan Lele	DI Yogyakarta

Jml Unit	Jml Stfkt	Nama Unit Pembenuhan (<i>Hatchery Name</i>)	Komoditas (<i>Comodity</i>)	Provinsi (<i>Province</i>)
4	6	UPR Sembada Fish Farm	Ikan Nila	DI Yogyakarta
5	7	UPR Selosembodo Mina Growong	Ikan Nila	DI Yogyakarta
6	8	UPR Wagiran Fish Farm	Ikan Lele	DI Yogyakarta
7	9	PT. Central Proteinaprima Tbk.	Udang Vaname	Banten
8	10	UPR Sumarjoko Fish Farm	Ikan Lele	DI Yogyakarta
9	11	UPR Sanari Fish Farm	Ikan Lele	DI Yogyakarta
10	12	UPR Tombo Ati Farm	Ikan Lele	DI Yogyakarta
11	13	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar - Berap	Ikan Lele	Papua
	14	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar - Berap	Ikan Nila	Papua
	15	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar - Berap	Ikan Mas	Papua
12	16	Pokdakan Nengguambu	Ikan Nila	Papua
	17	Pokdakan Nengguambu	Ikan Mas	Papua
13	18	Pokdakan Safana Farm	Ikan Lele	Papua
14	19	Balai Benih Ikan Pincuran Boga	Ikan Nila	Sumatera Barat
15	20	UPR Adil Sejahtera	Ikan Lele	Sumatera Barat
16	21	UPR JKA Fish	Ikan Lele	Sumatera Barat
17	22	UPR Sicincin Abadi	Ikan Lele	Sumatera Barat
18	23	UPR Tunas Karya	Ikan Lele	Sumatera Barat
19	24	UPR Titipan Ilahi	Ikan Lele	Sumatera Barat
20	25	Kelompok Air Manau	Ikan Lele	Sumatera Selatan
21	26	Kelompok Muara Apa Mandiri	Ikan Lele	Sumatera Selatan
22	27	Kelompok Dusun Lama	Ikan Lele	Sumatera Selatan
23	28	Kelompok Mina Tebat	Ikan Lele	Sumatera Selatan
24	29	Kelompok Taufiqul Islam	Ikan Lele	Sumatera Selatan
25	30	Pokdakan HSRT Lestari Kerapu	Ikan Kerapu	Kepulauan Riau
26	31	Pokdakan D-Marine Aquaculture	Ikan Kerapu	Kepulauan Riau
27	32	HSRT Harapan Desa	Ikan Kerapu	Kepulauan Riau
	33	HSRT Harapan Jaya	Ikan Kerapu	Kepulauan Riau
29	34	HSRT Maju Jaya	Ikan Kerapu	Kepulauan Riau
30	35	UPR Ahmad Fauzan (Maju Jaya Asri)	Ikan Lele	Kepulauan Riau
31	36	UPR Bintang Mina Sukses	Ikan Lele	Kepulauan Riau
32	37	UPR Rawa Bening	Ikan Lele	Kepulauan Riau
33	38	Wono Mina Sari	Ikan Lele	Jawa Tengah
34	39	Mina Banyu Adem	Ikan Lele	Jawa Tengah
35	40	Mina Sari Banyu	Ikan Lele	Jawa Tengah
36	41	Mina Makmur	Ikan Nila	Jawa Tengah
37	42	UPR Edi Farm	Ikan Lele	Jawa Tengah
38	43	Pokdakan Lele Muda Berjaya	Ikan Lele	Sumatera Barat
39	44	UPR Mefior	Ikan Mas	Sumatera Barat
40	45	UPR Melati	Ikan Mas	Sumatera Barat
41	46	Pokdakan Mitra Jaya Putra	Ikan Lele	Sumatera Barat
42	47	UPR Mina Mustika	Ikan Mas	Sumatera Barat
43	48	HSRT Berkah Kerapu	Ikan Kerapu	Jawa Timur
44	49	UD. Kerapu Berkah Melimpah	Ikan Kerapu	Jawa Timur

Jml Unit	Jml Stfkt	Nama Unit Pembenihan (<i>Hatchery Name</i>)	Komoditas (<i>Comodity</i>)	Provinsi (<i>Province</i>)
45	50	UD. Banyumas Mina Sagara	Ikan Kerapu	Jawa Timur
46	51	PT. Kisemarmas	Udang Vaname	Jawa Timur
47	52	PT. Centralpertiwi Bahari - Hatchery Situbondo	Udang Vaname	Jawa Timur
48	53	Balai Benih Ikan (BBI) Pracimantoro	Ikan Nila	Jawa Tengah
49	54	UPTD Pembenihan BBI Air Putih Dinas Perikanan	Ikan Mas	Sumatera Barat
50	55	UPR Mina Rahmad Mandiri	Ikan Lele	Sumatera Barat
51	56	UPT Balai Benih Ikan Kelas A Cibitung	Ikan Mas Marwana	Jawa Barat
	57	UPT Balai Benih Ikan Kelas A Cibitung	Ikan Nila Nirwana	Jawa Barat
52	58	UPR Sinar Bahari	Ikan Nila Merah	Jawa Barat
53	59	UPR Amanah Catfish Farm	Ikan Lele Sangkuriang	Jawa Barat
54	60	UPR Mina Sayaga	Ikan Lele Sangkuriang	Jawa Barat
55	61	Pokdakan Sawah Lele	Ikan Lele Sangkuriang	Jawa Barat
56	62	Berkah Rabbul Izzati	Ikan Kerapu	Jawa Timur
57	63	UD. Berkah Perikanan 86	Ikan Kerapu	Jawa Timur
58	64	HSRT Naufa Benur	Udang Vaname	Sulawesi Selatan
59	65	HSRT Dewata Benur	Udang Vaname	Sulawesi Selatan
60	66	HSRT Putra Benur	Udang Vaname	Sulawesi Selatan
61	67	HSRT Rezky Bersama	Udang Vaname	Sulawesi Selatan
62	68	HSRT Windu Pasifik	Udang Vaname	Sulawesi Selatan
63	69	HSRT Benur Wahid Sejahtera	Udang Vaname	Sulawesi Selatan
64	70	Pokdakan Sejahtera	Ikan Lele	Jawa Tengah
65	71	Sukses Tani	Ikan Lele	Jawa Tengah
66	72	Pokdakan Sumber Rejeki	Ikan Lele	Jawa Tengah
67	73	Pokdakan Sedyo Mulyo	Ikan Lele	Jawa Tengah
68	74	Pokdakan Bina Usaha Mandiri	Ikan Lele	Jawa Tengah
69	75	SKI Farm	Ikan Lele	Jawa Tengah
70	76	Pak ATO Lele Farm	Ikan Lele	Jawa Tengah
71	77	Balai Benih Ikan (BBI) Karangpandan	Ikan Karper	Jawa Tengah
	78	Balai Benih Ikan (BBI) Karangpandan	Ikan Nila	Jawa Tengah
72	79	Aris Bibit Lele	Ikan Lele	Jawa Tengah
73	80	Pokdakan Mina Mandiri	Ikan Lele	Jawa Tengah
74	81	Pokdakan Mina Jaya	Ikan Lele	Jawa Tengah
75	82	Pokdakan Berkah Mandiri	Ikan Lele	Jawa Tengah
76	83	Tirtorejo	Ikan Lele	Jawa Tengah
77	84	Pokdakan Mina Tanjungharjo	Ikan Lele	Jawa Tengah
78	85	Mas Lele	Ikan Lele	Jawa Tengah
79	86	Sumber Rejeki Farm	Ikan Lele	Jawa Tengah
80	87	Golden Fish Farm	Ikan Mas	Sulawesi Utara
	88	Golden Fish Farm	Ikan Nila	Sulawesi Utara
81	89	Minapolitan Jaya	Ikan Nila	Sulawesi Utara
82	90	Balai Perbenihan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan (BPPHPI) Tateli	Ikan Nila	Sulawesi Utara
83	91	PT. Tirtamutiara Makmur	Udang Vaname	Jawa Timur

Jml Unit	Jml Stfkt	Nama Unit Pembenihan (<i>Hatchery Name</i>)	Komoditas (<i>Comodity</i>)	Provinsi (<i>Province</i>)
84	92	PT. Central Proteinaprima Hatchery Kalianda	Udang Putih / Vaname	Lampung
85	93	PT. Prima Larvae	Udang Vaname	Lampung
86	94	Unit Kerja Budidaya Air Laut (UK BAL) Sundak	Ikan Bandeng	DI Yogyakarta
87	95	Unit Kerja Budidaya Air Tawar (UK BAT) Wonocatur	Ikan Lele	DI Yogyakarta
88	96	Unit Kerja Budidaya Air Tawar (UK BAT) Cangkringan	Ikan Nila Merah Nilasa	DI Yogyakarta
89	97	Unit Kerja Budidaya Air Tawar (UK BAT) Sendangsari	Ikan Gurami	DI Yogyakarta
90	98	Unit Kerja Budidaya Air Tawar (UK BAT) Bejiharjo	Ikan Lele	DI Yogyakarta
91	99	UPR Agung Sangkuriang Farm	Ikan Lele Sangkuriang	Jawa Tengah
92	100	UPR Bangkit Lele Farm	Ikan Lele Sangkuriang	Jawa Tengah
93	101	Balai Benih Ikan Sei Batang	Ikan Nila	Kalimantan Tengah
	102	Balai Benih Ikan Sei Batang	Ikan Lele	Kalimantan Tengah
	103	Balai Benih Ikan Sei Batang	Ikan Patin	Kalimantan Tengah
	104	Balai Benih Ikan Sei Batang	Ikan Papuyu/Ikan Betok	Kalimantan Tengah
	105	Balai Benih Ikan Sei Batang	Ikan Gurami	Kalimantan Tengah
94	106	UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar - Bagendang	Ikan Nila	Kalimantan Tengah
95	107	UPTD. Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Unit km. 36 Tangkiling	Ikan Nila	Kalimantan Tengah
	108	UPTD. Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Unit km. 36 Tangkiling	Ikan Lele	Kalimantan Tengah
96	109	UPR Bawal Subur	Ikan Nila	Sulawesi Tenggara
97	110	UPR Mina Karya Lestari	Ikan Nila	Sulawesi Tenggara
	111	UPR Mina Karya Lestari	Ikan Mas	Sulawesi Tenggara
98	112	UPR Carper	Ikan Gurami	Sulawesi Tenggara
99	113	UPR Mina Tani	Ikan Gurami	Sulawesi Tenggara
100	114	UPR Mina Sumber Rezeky	Ikan Gurami	Sulawesi Tenggara
101	115	UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Rahandouna	Ikan Nila	Sulawesi Tenggara
102	116	UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Ranomeeto	Ikan Mas	Sulawesi Tenggara
	117	UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Ranomeeto	Ikan Nila	Sulawesi Tenggara
103	118	UD Sinar Windu	Udang Vaname	Sulawesi Tenggara
104	119	UPR Kalaora	Ikan Gurami	Sulawesi Tenggara
105	120	UPR Nunulai	Ikan Mas	Sulawesi Tenggara
106	121	UPR Anandoko Nunulai	Ikan Nila	Sulawesi Tenggara
107	122	UPR Suka Maju	Ikan Nila	Sulawesi Tenggara
	123	UPR Suka Maju	Ikan Lele	Sulawesi Tenggara
108	124	UPR Ikhsan Tani Makmur	Ikan Mas	Sulawesi Tenggara
109	125	UPR Makmur	Ikan Lele	Sulawesi Tenggara
110	126	UPR Teposaliro	Ikan Gurami	Sulawesi Tenggara
111	127	UPR Bumi Masagena	Ikan Lele	Sulawesi Tenggara
112	128	UPR Oase Fish Farm	Ikan Lele	Jawa Timur
113	129	UPT PBAT Pare	Ikan Lele	Jawa Timur
114	130	UPR Trader Lele Farm	Ikan Lele	Jawa Timur
115	131	UPR Asfi Farm	Ikan Lele	Jawa Timur

Jml Unit	Jml Stfkt	Nama Unit Pembenihan (<i>Hatchery Name</i>)	Komoditas (<i>Comodity</i>)	Provinsi (<i>Province</i>)
116	132	UPR Catfish Park	Ikan Lele	Jawa Timur
117	133	UPR Berkah Lele	Ikan Lele	Jawa Timur
118	134	UPR Catfish Max	Ikan Lele	Jawa Timur
119	135	UPR Goldie Farm	Ikan Lele	Jawa Timur
120	136	UPR Zen Mashudi Lele Catfish	Ikan Lele	Jawa Timur
121	137	Aji Farm	Ikan Patin	Jawa Timur
122	138	UPR Catfish Farm	Ikan Lele	Jawa Timur
123	139	UPR Orang Tua Catfish Farm	Ikan Lele	Jawa Timur
124	140	UPR Jacky Catfish Lele	Ikan Lele	Jawa Timur
125	141	UPT Budidaya Perikanan Air Tawar Jombang	Ikan Lele	Jawa Timur
126	142	UPR Kampung Lele	Ikan Lele	Jawa Timur
127	143	UPR Mina Usaha I	Ikan Lele	Jawa Timur
128	144	UPR Army Fish	Ikan Lele	Jawa Timur
129	145	UPR Babe Aquaculture	Ikan Lele	Jawa Timur
130	146	PT. Benur Andalan Abadi	Udang Vaname	Banten
131	147	PT. Kona Bay Indonesia	Udang Vaname	Banten
132	148	PT. Prima Benur Bangka	Udang Vaname	Kepulauan Bangka Belitung
133	149	PT. Suryawindu Pertiwi – Bireuen	Udang Vaname	NAD
134	150	UPR Sahidin Gurame Bemo	Ikan Gurami	Jawa Barat
135	151	Ijan Farm 27	Ikan Lele Mutiara	Jawa Barat
136	152	PT. Suri Tani Pemuka Unit Hatchery Indramayu	Udang Vaname	Jawa Barat
137	153	Koperasi Utama Sejahtera Mandiri	Ikan Lele	Jawa Tengah
138	154	Pokdakan Karya Mulya II	Ikan Nila	Jawa Tengah
139	155	Pokdakan Kompos Magot Bakung Lancar	Ikan Lele	Jawa Tengah
140	156	Pokdakan Setia Mukti Kober	Ikan Nila	Jawa Tengah
141	157	UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar Wilayah Kerja Sidabowa	Ikan Nila	Jawa Tengah
	158	UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar Wilayah Kerja Sidabowa	Ikan Gurami	Jawa Tengah
142	159	UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar Wilayah Kerja Pandak	Ikan Nila	Jawa Tengah
	160	UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar Wilayah Kerja Pandak	Ikan Gurami	Jawa Tengah
	161	UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar Wilayah Kerja Pandak	Ikan Nilem	Jawa Tengah
143	162	PT. Centralpertiwi Bahari – Hatchery Rembang	Udang Vaname	Jawa Tengah
144	163	UPR Saeman	Ikan Lele	Kepulauan Riau
145	164	UPR Ahmad Fauzi	Ikan Lele Sangkuriang	Kepulauan Riau
146	165	UPR Herman Wahyudi	Ikan Lele	Kepulauan Riau
147	166	UPR Rudi Friyono	Ikan Lele	Kepulauan Riau
148	167	UPR Sanan	Ikan Lele	Kepulauan Riau
149	168	UPR Dwi Waluyo	Ikan Lele	Kepulauan Riau
150	169	Apin Purba Farm	Ikan Gurami	Kepulauan Riau
	170	Apin Purba Farm	Ikan Patin Siam	Kepulauan Riau
151	171	Pokdakan Tibelat	Ikan Nila	Kepulauan Riau
	172	Pokdakan Tibelat	Ikan Mas	Kepulauan Riau
152	173	HSRT Berkah Gesit Karya	Ikan Kerapu Cantang	Kepulauan Riau
153	174	UPR Parmin Fish Farm	Ikan Gurami	Kepulauan Riau
	175	UPR Parmin Fish Farm	Ikan Mas	Kepulauan Riau

Jml Unit	Jml Stfkt	Nama Unit Pembenihan (<i>Hatchery Name</i>)	Komoditas (<i>Comodity</i>)	Provinsi (<i>Province</i>)
154	176	UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	Ikan Nila	Sumatera Utara
	177	UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	Ikan Lele	Sumatera Utara
	178	UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang	Ikan Patin	Sumatera Utara
155	179	PT. Tri Karta Pratama	Udang Vaname	Banten

Sumber data : Hasil rekapitulasi Direktorat Perbenihan

Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya dan Sertifikasi untuk Ekspor Bidang Pakan dan Obat Ikan

Indikator ini memiliki target 100 paket yang terdiri dari 50 paket analisa mutu pakan dan obat ikan serta 50 sertifikasi CPPIB. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini semula sebesar Rp1.150.000.000,- dan pasca pemotongan anggaran menjadi Rp774.715.000,- dengan realisasi serapan sebanyak Rp769.485.600,- atau capaian sebesar 99,32% dengan capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 148% dari target dan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 20,32%.

Sertifikasi CPPIB dilakukan dalam rangka pengendalian mutu untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya bagi masyarakat. CPPIB mengatur mengenai kegiatan praproduksi (lokasi, kemudahan aksesibilitas, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi dan higiene, pengadaan dan penyiapan bahan baku pakan, penyimpanan bahan baku pakan), produksi (pembuatan pakan, pengendalian mutu pakan, pengemasan dan pelabelan), pascaproduksi (penyimpanan pakan, pendistribusian pakan), manajemen usaha (pekerja dan pengawasan), pengelolaan lingkungan dan pendokumentasian. Unit produksi pakan ikan yang lulus sertifikasi CPPIB sampai tahun 2021 sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 12. Unit Produksi Pakan Ikan Yang Lulus Sertifikasi CPPIB Tahun 2021

No	Propinsi	Nama Produsen Pakan	Nomor Sertifikat
1.	Jawa Tengah	Pokdakan Berkah Lestari	ID-CPPIB-14-M-0000722021
2.	Jawa Barat	Pokdakan Nurul Nila Gurame Subang	ID-CPPIB-13-M-0000732021
3.	Lampung	Mina Abadi Palas	ID-CPPIB-09-M-0000742021
4.	Lampung	Mina Lestari Tanjung Sari	ID-CPPIB-09-M-0000752021
5.	Lampung	Pokdakan Tinem Langgeng Makmur	ID-CPPIB-09-M-0000762021
6.	Lampung	Pokdakan Mitra Patin Pagelaran	ID-CPPIB-09-M-0000772021
7.	Jawa Timur	PT. Japfa Confeed Indonesia. Tbk	ID-CPPIB-15-I-0000782021
8.	Jawa Timur	Pokdakan Mandiri Utama Jaya	ID-CPPIB-15-I-0000792021
9.	Jawa Timur	UMK Samutama Sanjaya Prima	ID-CPPIB-15-I-0000802021
10.	Jawa Timur	KUB Timoer Mandiri	ID-CPPIB-15-I-0000812021
11.	Jawa Timur	Pokdakan Tri Usaha Bakti	ID-CPPIB-15-I-0000822021
12.	Sumatera Utara	PT. Mabar Feed Indonesia	ID-CPPIB-02-I-0000832021
13.	Sumatera Utara	PT. Indojoya Agrinusa	ID-CPPIB-02-I-0000842021
14.	Sumatera Utara	CV. Faeyza Gemilang	ID-CPPIB-02-I-0000852021
15.	Sumatera Utara	Koperasi Produsen Mina Mitra Sejahtera	ID-CPPIB-02-I-0000862021
16.	Sulawesi Utara	Pokdakan Wira Sejahtera Bersama	ID-CPPIB-22-M-0000872021
17.	Sumatera Barat	TEMPURUNG INDAH	ID-CPPIB-04-M-0000882021
18.	Sumatera Barat	Pokdakan Cincau	ID-CPPIB-04-M-0000892021
19.	Sumatera Barat	Pokdakan Rawa Gemulau Saiyo	ID-CPPIB-04-M-0000902021
20.	Sumatera Barat	Pokdakan Talun Indah	ID-CPPIB-04-M-0000912021

No	Propinsi	Nama Produsen Pakan	Nomor Sertifikat
21.	Riau	Pokdakan Swadaya Mandiri	ID-CPPIB-05-M-0000922021
22.	Riau	Pokdakan Mukti dan Mulyo	ID-CPPIB-05-M-0000932021
23.	Riau	Pokdakan Mutiara Patin	ID-CPPIB-05-M-0000942021
24.	Riau	Pokdakan Sumber Rejeki	ID-CPPIB-05-M-0000952021
25.	Corontalo	Pokdakan Lembah Bulotu	ID-CPPIB-27-M-0000962021
26.	Corontalo	Pokdakan Air Kehidupan	ID-CPPIB-27-M-0000972021
27.	Corontalo	Pokdakan Harapan Mina Bersama	ID-CPPIB-27-M-0000982021
28.	Jawa Barat	Pokdakan Bina Tenaga Inti Rakyat	ID-CPPIB-13-M-0000992021
29.	Jawa Barat	Pokdakan Leles Lestari	ID-CPPIB-13-M-0001002021
30.	Jawa Barat	Pokdakan Gaul Cai	ID-CPPIB-13-M-0001012021
31.	Bengkulu	Pokdakan Bader Mas	ID-CPPIB-08-M-0001022021
32.	Bengkulu	Pokdakan Mina Tirta I	ID-CPPIB-08-M-0001032021
33.	Banten	PT. New Hope Aqua Feed Indonesia	ID-CPPIB-11-I-0001042021
34.	Banten	PT. Wonokoyo Jaya Kusuma	ID-CPPIB-11-I-0001052021
35.	Banten	PT. Satwa Boga Sempurna	ID-CPPIB-11-I-0001062021
36.	Sumatera Selatan	Kelompok Mitra Mandiri	ID-CPPIB-03-M-0001062021
37.	Jawa Barat	UD. Babelan Agro Sejahtera	ID-CPPIB-13-M-0001072021
38.	Jawa Barat	PT. Sinta Prima Feedmill	ID-CPPIB-13-I-0000032021 P-1
39.	Lampung	CV. Mekar Makmur	ID-CPPIB-09-M-0001082021
40.	Lampung	PT. Indonesia Evergreen Aquaculture	ID-CPPIB-09-I-0001092021
41.	Jawa Tengah	UD. Semarang Aquaculturis Grower (SMAR'G)	ID-CPPIB-14-M-0001102021
42.	Jawa Tengah	PT. Cargill Indonesia	ID-CPPIB-14-I-0000082021 P-1
43.	Jawa Tengah	PT. Havindo Pakan Optima	ID-CPPIB-14-I-0000012021 P-1
44.	Jawa Barat	BLUPPB Karawang	ID-CPPIB-13-M-0001112021
45.	Sulawesi Selatan	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	ID-CPPIB-23-M-0001122021

Sumber : Hasil Rekapitulasi Data Kelompok Peredaran Pakan

Pakan dan Obat Ikan

Kegiatan analisa mutu pakan dan obat ikan Tahun 2021, telah dilakukan sebanyak 103 sampel yang diambil dari produsen pakan, produsen obat ikan, pembudidaya ikan, dan toko obat ikan di Provinsi Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat dan Jawa Barat. Sampel pakan dan obat ikan ini selanjutnya dilakukan analisa di Laboratorium, hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan mutu pakan dan obat ikan untuk menjaga konsistensi mutu pakan dan obat ikan yang sudah teregistrasi.

Sampel pakan ikan telah dikirim ke laboratorium BBPBAT Sukabumi untuk dianalisa sebanyak 96 sampel dan masih menunggu hasil analisisnya, sedangkan sampel obat ikan telah dikirim ke laboratorium LP2IL Serang sebanyak 7 sampel dan telah diterbitkan hasil analisisnya.

Tabel 13. Sampel Pakan Ikan Yang Diambil dan Dianalisis Mutunya Tahun 2021

No	Merek	No Registrasi	Produksi	Peruntukan
1.	SUPER CARP S99-3	KKP RI IM 1318072017	PT. Central Panganpertiwi – Cikampek	Ikan Mas
2.	ALL FEED 2,3,4 (mix)	KKP RI Ibd 1782082019		Ikan bandeng
3.	333 -4mm	KKP RI IP 1796082019		Ikan Patin/ Mutu II
4.	HI PRO VITE 771 -2, -3 (mix)	KKP RI IL 1313072017		Ikan Lele
5.	M 22 L - 3	KKP RI IL 667082017	PT. Suri Tani Pemuka Unit Purwakarta	Ikan Lele
6.	PA SUPER 2	KKP RI IM 677082017		Ikan Mas
7.	SGH Grower	KKP RI UV 673082019		Udang Vaname

No	Merek	No Registrasi	Produksi	Peruntukan
8.	PI Comfeed -3	KKP RI IM 065112018		Ikan Mas
9.	8830	KKP RI UV 2017032020	PT. Tong Wei Indonesia, Purwakarta	Udang Vaname
10.	152-1	KKP RI IL 2002032020		Benih Lele
11.	983 1,4			Udang Vaname
12.	985 1,2			Udang Vaname
13.	101	KKP RI IM 1995032020		Ikan Mas
14.	LNB	KKP RI IL 1753082019	BBPBAP Jepara	Ikan Lele
15.	SA-00	KKP RI UV 1907122019	PT. Cheil Jedang Superfeed	udang vaname
16.	SI-03	KKP RI UV 1907122019		udang vaname
17.	SA-02SP	KKP RI UV 1912122019		udang vaname
18.	SS-02	KKP RI UV 1916122019		udang vaname
19.	6801	KKP RI UV 2357122020		PT. Newhope Aqua Feed Indonesia
20.	9801	KKP RI UV 1677032019	udang vaname	
21.	9802P	KKP RI UV 1678032019	udang vaname	
22.	Grande (GDSN 3)	KKP RI IP 1604092018	Ikan Patin	
23.	Beryl	KKP RI UV 2173082020	PT. Grobest Indomakmur	udang vaname
24.	Chuen Shin	KKP RI UV 2171082020		udang vaname
25.	Ecobest	KKP RI UV 2182082020		udang vaname
26.	Viva	KKP RI IL 2187082020P		ikan lele
27.	Ruby SP 3A	KKP RI UV 1588072018	PT. Universal Agri Bisnisindo	udang vaname
28.	Ruby HG-3	KKP RI Ibd 1905122019		ikan bandeng
29.	Ruby SP 2 A	KKP RI UV 1588072018		udang vaname
30.	S 28-3	KKP RI IM 2215092020		Ikan Mas
31.	Eco Green 933 P	KKP RI UV 1719032019	PT. Gold Coin Specialities, Bekasi	udang vaname
32.	Eco Green EG 933S	KKP RI UV 1718032019		
33.	Gold Forte 933 S	KKP RI UV 1901122019		
34.	Gold Forte 932 P	KKP RI UV 1900122019		
35.	Haima Brand	KKP RI UV 1650122018	PT. Allied Feed	udang vaname
36.	Kendi Mas	KKP RI UW 1651122018		Udang Windu
37.	Misuma Feed	KKP RI Ibd 786122018		ikan bandeng
38.	Maskot 168	KKP RI IN 1648122018		Benih Ikan Nila
39.	Active AT Plus -3	KKP RI IB 1662122018		PT. CJ Feed Semarang
40.	Smart SM Multi-3	KKP RI IP 1654112018P	Ikan patin	
41.	Galaxy GL Multi 2	KKP RI IN 1622112018	Ikan Nila	
42.	Galaxy GL Super 3	KKP RI IL 1627112018	Ikan Lele	
43.	Active AT 3	KKP RI IBD 1789082019	Ikan bandeng	
44.	Optimax AL 622	KKP RI IL 041022018	PT. Cargill Indonesia, Semarang	Ikan Lele
45.	Pressto AB 522 (2MM)	KKP RI Ibd 1606092018		Ikan bandeng
46.	RT Excel RT 994	KKP RI IN 1564042018		Ikan Nila
47.	Pangus Extruded Excel Series (3mm)	KKP RI IP 2342122020		Ikan Patin
48.	Infiniti 3 MM	KKP RI IN 1784082019		Ikan Nila
49.	HIU2-3	KKP RI Ibd 2196082020	PT. Havindo Pakan Optima	Ikan bandeng
50.	HL 3	KKP RI IL 1125032016		Ikan Lele
51.	Eko Feed 4	KKP RI Ibd 1783082019	PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK. GROUP	Pakan Tambahan Ikan Bandeng
52.	Hi Provite 781-2	KKP RI IL 2391032021		Pakan Ikan Lele
53.	Surya (SW)	KKP RI IM 056072017		PT. WONOKOYO JAYA KUSUMA
54.	Satria-Li (TW-L)	KKP RI IN 1312072017	Pakan Ikan Nila	
55.	Mentari (MW)	KKP RI IM 057042018	Pakan Ikan Mas	
56.	Shrimp Feed VC 8	KKP RI UV 2390032021	PT. CARGILL INDONESIA	Pakan Udang Vaname
57.	Shrimp Feed Regular SR-P1	KKP RI UV 2389032021		
58.	Shrimp Feed VP 8	KKP RI UV 1953122019P		
59.	Epibal 700	KKP RI UV 2003032020	PT. BEHN MEYER CHEMICALS	Pakan Udang Vaname
60.	Epibal 500	KKP RI UV 1142062016		
61.	Medali PAA 88	KKP RI IM 964122014	PT. CITRA MANDIRI KENCANA	Pakan Ikan Mas
62.	Beauty DP 826	Belum terdaftar		Pakan Ikan Air Tawar

No	Merek	No Registrasi	Produksi	Peruntukan
63.	Beauty UP 833	KKP RI IB 1582072018		Pakan Ikan Bandeng
64.	Surya SL 2	KKP RI IL 1965122019	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Ikan Lele
65.	Mentari MI 3	KKP RI IB 1975122019		Ikan Bandeng (Mutu II)
66.	Maxima	KKP RI IP 1773082019	PT. Superindo Jaya Makmur	Ikan Patin (Mutu II)
67.	Performa	KKP RI IL 1774082019		Ikan Lele
68.	SI-02P	KKP RI UV 1190082016	PT. CJ Feed Jombang	Udang Vaname
69.	SS-02P	KKP RI UV 669052017		
70.	LP-2	KKP RI IL 454082016	PT. Matahari Sakti	Ikan Lele
71.	GPP-2	KKP RI IP 1769082019	PT. Matahari Sakti	Ikan Patin
72.	HDV-B	KKP RI UV 1822102019	PT. Haida Agriculture Indonesia	Udang Vaname
73.	HDPIN	KKP RI IN 1831102019		Ikan Nila
74.	835-4	KKP RI IN 1851102019	PT New Hope Aquafeed Serang	Pakan Ikan Nila
75.	982-3	KKP RI IN 472032017	PT Leong Hup Jayaindo	Pakan Ikan Nila
76.	JTA - 3	KKP RI IM 480112017	PT Sinta Prima Feedmill	Ikan Mas
77.	9223L	KKP RI UV 1978122019	PT. Ind. Evergreen Agricultur	udang vanamei
78.	103-4	KKP RI UV 1977122019		
79.	SI-03	KKP RI UV 1932 122019	PT. CJ FEED LAMPUNG	udang vanamei
80.	SC-02	KKP RI UV 1931 122019		
81.	PA EXTRUDER	KKP RI IM 846112018	PT Suri Tani Pemuka	ikan mas
82.	SPLA-12	KKP RI IL 666082017		ikan LELE
83.	779-3	KKP RI IM 707042018	PT Central Pertiwi Bahari	IKAN MAS
84.	789	KKP RI IN 2320112020		IKAN NILA
85.	FORTE 933P	KKP RI UV 1481022018-LPG	PT. GOLD COIN SPECIALITY	udang vanamei
86.	FORTE 933S	KKP RI UV 1543032018-LPG		
87.	983 Super	KKP RI IN 484042017	PT. Leong Hup Jayaindo	Ikan Nila
88.	981 LP	KKP RI IL 474032017		Ikan Lele
89.	Hi Provite 771-2	KKP RI IL 1313072017	PT. Central Proteina Prima	Ikan Lele
90.	Super Carp 599-2	KKP RI IM 1318072017		Ikan Mas
91.	Irawan 683 SP	KKP RI UV 1610092018		Udang Vanamei
92.	Marine 999-3	KKP RI UV 822012019		Udang Vanamei
93.	Mabar MB SQ (01,02,03,03P,10) (Mix)	KKP RI UV 1557042018	PT. Mabar Feed Indonesia	Udang Vanamei
94.	MB FE 3,4,5 (Mix)	KKP RI IP 1087112015		Ikan Patin
95.	RT Excel Series (RT 994, RT 995) (Mix)	KKP RI IN 1564042018-MD	PT. Cargill Indonesia	Ikan Nila
96.	Dumbo Jaya (DJ 838) 4 mm	KKP RI IP 1302052017-MD		Ikan Patin

Sumber : Hasil Rekapitulasi Data Kelompok Peredaran Pakan

Tabel 14. Sampel Obat Ikan Yang Diambil dan Dianalisis Mutunya Tahun 2021

No	Nama Obat Ikan	Nomor Pendaftaran	No. Batch/Kode Produksi	Nama Produsen
1.	Ursal	KKP RI No.D 1703056-P1 PBC	112020 (exp 112022)	CV. Bunga Tani, Sukodadi Lamongan 62253
2.	Mina 88	KKP RI No.D 1910430 PrBC	N 140131223010 (exp Feb 22)	PT. Sinar Hidup Satwa (SHS)
3.	C-San Aquatic	KKP RI No. D 1507022 - P1 FTS	WH 0316C (Exp Agst 22)	PT Sanbe Farma
4.	C-San Aquatic	KKP RI No. D 2006022-P1 PBS	AH 1177 (Exp Agst 23)	PT Sanbe Farma
5.	C-San Aquatic	KKP RI No. D 1507022 - P1 FTS	WH 0316C (Exp Agst 22)	PT Sanbe Farma

No	Nama Obat Ikan	Nomor Pendaftaran	No. Batch/Kode Produksi	Nama Produsen
6.	Destan Aquatic	KKP RI No. D 1507016 – P1 FTC	AH 1098 (Exp Agst 23)	PT Sanbe Farma
7.	Boster Grotop	KKP RI No. D 1205196 PBS	A 9919 (Exp Jan 24)	PT Indosco Dwijaya

Sumber : Hasil Rekapitulasi Data Kelompok Peredaran Pakan

SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

IKU 10. Nilai PM RB Ditjen Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis -6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
IKU-10	Nilai PM RB Ditjen Perikanan Budidaya					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
31,55	30	32,51	104,87	3,04	34	95,61

PMPRB dilakukan untuk memperoleh informasi pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan internal instansi pemerintah. PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen: (i) Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results).

Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah (KKP) dalam menjalankan fungsinya, meliputi 8 area perubahan, yaitu: (i) Manajemen perubahan; (ii) Penataan peraturan perundang-undangan; (iii) Penataan dan penguatan organisasi; (iv) Penataan tatalaksana; (v) Penataan sistem manajemen SDM; (vi) Penguatan akuntabilitas kinerja; (vii) Penguatan pengawasan; dan (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit, meliputi 3 hal yaitu: (i) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi; (ii) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN; dan (iii) Pelayanan publik.

Hubungan sebab-akibat antara dua komponen tersebut, dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi, melalui inovasi dan pembelajaran, dimana proses perbaikan tersebut akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Periode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2020/2021 dilaksanakan dengan melihat dokumen bukti dukung pelaksanaan program reformasi birokrasi dari bulan Januari 2021 sampai dengan pada saat konsensus

PMPRB KKP. Inspektorat Jenderal KKP telah melakukan evaluasi PMPRB Unit Eselon I lingkup KKP tahun 2020/2021 dimulai pada minggu ke-3 bulan Februari Tahun 2021.

Dari hasil konsensus PMPRB unit eselon I lingkup KKP yaitu pada bulan April 2021 di Jakarta nilai PMPRB DJPB tahun 2020/2021 adalah 32,51. Capaian tersebut melampaui target nilai RB DJPB tahun 2021 yaitu 31 dari 36,30 atau 104,87%. Nilai PMPRB DJPB Tahun 2020/2021 untuk masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Nilai PMPRB Ditjen PB Tahun 2021

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,93	3,00	2,42
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,75	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	0,75
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,89	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,37	2,00	1,99
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,07	3,75	3,13
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,12	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,14	3,75	3,25
	Nilai	14,60	13,27	21,70	19,24
	Nilai PMPRB (Pemenuhan + Reform)	32,51 dari total bobot 26,30 atau 89,55%			

Dapat dilihat pada tabel rincian nilai PMPRB DJPB Tahun 2021, capaian untuk aspek pemenuhan dokumen adalah 13,27 dari 14,60 atau sebesar 90,89%. Sedangkan capaian untuk aspek reform adalah 19,24 dari 21,70 atau sebesar 88,66%. Capaian tersebut sudah cukup baik terutama pada aspek reform yang mengalami kenaikan dari capaian tahun lalu yaitu 17,43 menjadi 19,24 atau sebesar 10,38%.

Walaupun capaian Nilai PMPRB DJPB telah melampaui target, tapi jika dibandingkan dengan Nilai PMPRB Eselon I lainnya (tabel 17) , Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya masih dibawah Eselon I lainnya.

Tabel 16. Nilai PMPRB KKP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keterangan
Nilai kinerja RB KKP	72	78,27	108,71	Surat Hasil Penilaian Mandiri RB KKP BERITA ACARA HASIL KONSENSUS PMPRB KKP TAHUN 2019-2020 Nomor : BAHK.PMPRB-01/ITJ/VI/2020 Tanggal: 18 Juni 2020
Nilai PMPRB DJPT	31	31,08	100,26	
Nilai PMPRB DJPB	31	32,51	104,87	
Nilai PMPRB DJPRL	31	32,61	105,19	
Nilai PMPRB DJPDS	31	33,67	108,61	
Nilai PMPRB DJPSDKP	31	33,23	107,19	
Nilai PMPRB BRSDM	31	32,85	105,97	
Nilai PMPRB BKIPM	31	32,93	106,23	
Nilai PMPRB SETJEN	31	32,98	106,39	

Indikator penilaian yang masih perlu peningkatan pada aspek reform yaitu pada area Manajemen Perubahan kinerja Agen Perubahan lingkup DJPB Tahun 2020 masih belum terlihat dampaknya bagi organisasi. Dari 25 orang agen perubahan lingkup DJPB hanya 11 orang agen perubahan yang menyusun rencana kerja

perubahan dan melaporkan hasil pelaksanaannya. Hal ini perlu perhatian serius untuk Agen Perubahan DJPB agar lebih serius menyusun rencana kerja perubahan dan melaporkan hasilnya pada akhir tahun. Kemudian yang berikutnya adalah di area Penguatan Akuntabilitas perlu ditingkatkan kembali jumlah capaian sasaran kinerja yang tercapai 100% atau lebih dari seluruh sasaran kinerja. Dan yang terakhir adalah di area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, perlu peningkatan dalam hal menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup DJPB diharapkan melalui inovasi pelayanan dapat memberikan kemudahan bagi stakeholder antara lain dengan membuat alur yang lebih pendek/singkat, waktu lebih singkat atau integrasi dengan sistem aplikasi. Apabila ketiga indikator penilaian pada aspek reform tersebut dapat ditingkatkan, maka optimis untuk capaian nilai PMPRB DJPB Tahun 2022 dapat lebih baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yaitu para penanggung jawab program reformasi birokrasi DJPB belum disiplin dalam menyampaikan dokumen bukti dukung pelaksanaan program reformasi birokrasi tahun 2020-2021 sehingga dibutuhkan waktu lebih lama dalam proses penilaian.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan selanjutnya yaitu Pembentukan Tim RB untuk tahun 2022, Penyusunan Rencana Aksi RB untuk tahun 2022, Evaluasi Rencana Aksi RB TW IV tahun 2021. Akan berkoordinasi dengan para penanggung jawab program reformasi birokrasi DJPB agar menyampaikan dokumen bukti dukung pelaksanaan program reformasi birokrasi tepat waktu agar pelaksanaan PMPRB dapat berjalan lebih efektif.

Anggaran untuk mendukung IKU “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya” pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp.57.654.000,- dari pagu sebesar Rp.58.000.000,-.

IKU 11. Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)

Sasaran Strategis -6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
IKU-11	Indeks Profesional ASN DJPB					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
74,70	72	80,94	103,75	16,86	76	

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui : tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin** per masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Nilai capaian Pada tahun 2015 Ditjen. PSDKP melaksanakan *Assesment* terhadap pejabat eselon IV lingkup Ditjen.PSDKP, peserta Assesment pejabat adalah Seluruh pejabat eselon IV lingkup Ditjen PSDKP sebanyak 63 orang.Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai, diperoleh nilai indeks kesenjangan kompetensi eselon IV sebesar 10% atau dengan nilai 90.Tahun 2021 sebesar 80,94%, diatas target yang ditetapkan sebesar 73.

Nilai yang rendah terjadi pada nilai kualifikasi dengan persentase capaian hanya 12,74 dari bobot 25 atau 50,96%. Nilai kualifikasi sendiri diperoleh dari tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP. Nilai terendah berikutnya adalah nilai kompetensi ASN dengan bobot 40, hanya tercapai 35,13 atau 87,82%. Nilai kompetensi diperoleh dari keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon). Nilai tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kompetensi ASN lingkup DJPB baik satker pusat maupun UPT.

Walaupun secara target DJPB sudah melebihi target bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai 74,70 tapi jika dibandingka dengan rata-rata KKP (tabel 19), nilai capaian DJPB masih di bawah capaian KKP tetapi jika dibandingka dengan antar Unit Eselon 1 DJPB berada di urutan ke 5.

Tabel 17. Capaian IP ASN KP Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
IP ASN DJPT	73	79,69	109,16	Berdasarkan aplikasi IP ASN per tgl 10 jan 2021, jam 24.00 di closing ND Karo SDMAO No. 233/SJ.3/KP.721/1/2022/S tgl 11 Jan 2022 tentang capaian indikator Kinerja Utama IP ASN 2020
IP ASN DJPB	73	80,94	110,88	
IP ASN DJPRL	73	83,68	114,63	
IP ASN DJPDS	73	82,97	113,66	
IP ASN DJPSDKP	73	77,91	106,73	
IP ASN BRSDM	73	79,73	109,22	
IP ASN BKIPM	73	83,03	113,74	
IP ASN ITJEN	73	84,74	116,08	
IP ASN SETJEN	73	79,52	108,93	
IP ASN KKP	73	81,36	111,45	

Permasalahan dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Proses penetapan keputusan pencatuman gelar pendidikan membutuhkan waktu lama (karena terkait dengan instansi lain). Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kualifikasi pada pengukuran IKU ini;
2. Pelaporan pelaksanaan telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Diklat, workshop, dan seminar belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut

Kualifikasi	12,80 Nilai 25% Bobot	IP ASN DITJEN DJPB 80,94
Kompetensi	35,13 Nilai 40% Bobot	
Kinerja	28,16 Nilai 30% Bobot	
Disiplin	4,86 Nilai 5% Bobot	

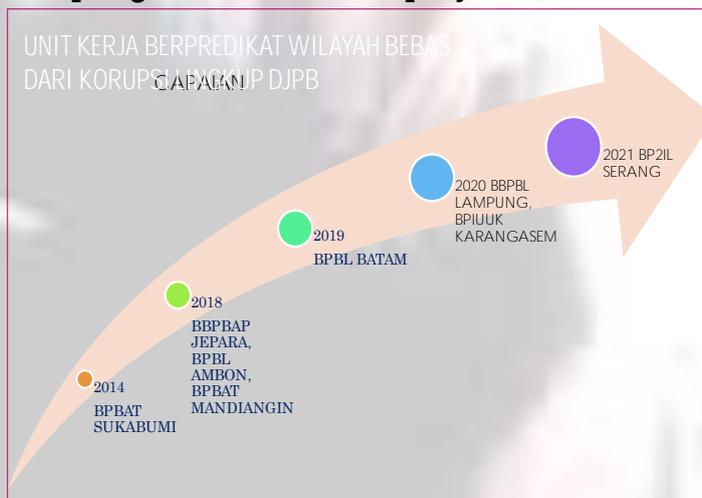
- merupakan elemen pendukung dari dimensi kompetensi atau merupakan bagian dari kegiatan kebutuhan kompetensi ASN dan orientasi CPNS;
- Masih terdapat PNS yang belum mematuhi kewajiban untuk mengisi capaian SKP setiap bulan, dan adanya perbedaan data dikarenakan PNS sedang belajar dan PNS yang melaksanakan cuti melahirkan. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kinerja atau merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kinerja ASN;
 - Pelaporan penjatuhan hukuman disiplin ringan yang menjadi kewenangan unit kerja belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi disiplin atau merupakan bagian dari kegiatan pembinaan kode etik dan disiplin ASN.

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan capaian IP ASN 2022 antara lain:

- Menyusun HCDP (Human Capital Development Program);
- Melakukan monitoring pengisian SKP Tahun 2021 sosialisasi PP 30/201
- Melakukan Bimbingan Teknis PP 30/2019 dan PermenPAN-RB 8/2021
- Melakukan Sosialisasi PP 94/2021

Anggaran untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp. 617.910.000,-, dengan realisasi sebesar sejumlah Rp.592.556.850,- atau sebesar 95,90%. Terdapat sisa anggaran sebesar 4,1% merupakan sisa pengembalian dari LS perjalanan Dinas.

IKU 12. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi



Sasaran Strategis -6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
IKU-12	Unit Kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2020			% Pertumbuhan 2020-2021	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
7	8	8	100	0	10	

Dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengkoordinasikan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya pada seluruh unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Sampai dengan tahun 2021 terdapat 8 (delapan) unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK, yaitu BBPBAT Sukabumi, BBPBAP Jepara, BPBL Ambon, BPBAT Mandiangin, BPBL Batam, BBPBL Lampung, BPIU2K Karangasem, BPKIL Serang.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 dalam upaya pencapaian IKU ini antara lain asistensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada 3 Unit Kerja yaitu: (i) BBPBAP Jepara pada tanggal 15 s/d 19 Maret 2021; (ii) BPBAT Mandiangin pada tanggal 29 Maret s/d 2 April 2021; dan (iii) BPBL Ambon pada tanggal 29 Maret s/d 2 April 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain adalah unit kerja belum konsisten mengupdate data dukung perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara berkala sehingga cenderung perubahan pedoman penilaian dari TPI KKP sehingga terkendala pada saat penilaian. Beberapa diantaranya disebabkan oleh kesibukan anggota Tim dalam memenuhi target kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsinya, keterbatasan SDM yang harus merangkap perkerjaan. Terkait adanya perubahan LKE dan Juknis pedoman penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM maka unit kerja harus menyesuaikan dengan LKE terbaru. Perlu koordinasi lebih intensif agar dokumen yang disiapkan memenuhi/ sesuai dengan kriteria penilaian.

Rencana aksi yang akan dilakukan berikutnya adalah Asistensi dan berkoordinasi dengan unit kerja lingkup DJPB yang melaksanakan pembangunan ZI menuju BK/WBBM untuk melakukan update dokumen bukti dukung sesuai dengan pedoman/juknis terbaru,

Anggaran untuk mendukung IKU “Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” pada triwulan IV tahun 2021 realisasi mencapai Rp.62.813.500,- dari pagu sebesar Rp.63.000.000,-.

IKU 13. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2019 (%)

Sasaran Strategis -6		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya				
IKU-13		Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran DJPB Tahun 2019				
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2020			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
0,14	≥1	0,2	180,50		≥1	120

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2020 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2020 (audit) tidak melebihi 1%.

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2020 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2020 (audit) tidak melebihi 1%.

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor 1088/ITj.0/TU.210/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 disampaikan bahwa capaian IKU batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan Keuangan KKP sebesar 0,07% sementara capaian IKU untuk DJPB sendiri sebesar 0,20 % atau mencapai 180,50% dari target. Tingginya realisasi Indikator ini mencerminkan adanya perbaikan dan disiplin satker untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Tabel 18. Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP”

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	371.774.244.798	379.182.525,00	<1	0,10	197,87
2	Itjen	65.520.750.972	0,00	<1	0,00	200,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	492.002.433.664	96.615.701,00	<1	0,02	198,04
4	Ditjen Perikanan Budidaya	816.747.196.652	1.592.937.168,80	<1	0,20	180,50
5	Ditjen PSDKP	678.507.729.219	0,00	<1	0,00	200,00
6	Ditjen PDSPKP	205.412.538.137	116.209.812,83	<1	0,06	194,34
7	Ditjen PRL	393.614.623.041	741.810.466,00	<1	0,19	181,15
8	BRSDMKP	1.320.746.519.611	267.065.763,00	<1	0,02	197,98
9	BKIPM	465.537.557.721	45.904.000,00	<1	0,01	199,01
TOTAL		4.809.863.593.815	3.239.725.436,63	<1	0,07	193,26

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 196.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp196.000.000,- untuk kegiatan perjalanan Dinas tindak lanjut penyelesaian LHP sesuai rekomendasi.

Kendala yaitu respon dari unit yang diaudit relatif lambat atau mendekati batas waktu sehingga kesulitan dalam merekonfirmasi atas temuan. Rencana aksi yang dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah akan melaksanakan koordinasi dengan satker terkait untuk percepatan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi atas hasil audit BPK.

IKU 14. Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)

Sasaran Strategis -6 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya



IKU-14	Nilai PM Sakip DJPB						
	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
		Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
	86,70	86,25	86,54	100,33	-0,18	86,97	99,50

Pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi dilakukan terhadap lima komponen utama SAKIP yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Selanjutnya disampaikan bahwa Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.

Penilaian terhadap implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap DJPB diperoleh nilai 86,54 sebagaimana tercantum dalam surat Inspektorat Jenderal KKP nomor 5089/ITJ/HP.440/VII/2021 tanggal 23 juli 2021. Jika dibandingkan dengan capaian Nilai AKIP 2020 terjadi penurunan capaian 0,18% ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa capaian IKU yang tidak tercapai.

Dilihat dari capaian KKP, Capaian DJPB masih diatas capaian KKP yang hanya mencapai 84,872 Tetapi jika dibandingkan dengan DJPSDKP capaian DJPB masih dibawah PSDKP. Ini terjadi karena dalam pencapaian sasaran kinerja ada beberapa kegiatan DJPB yang tidak memenuhi target antara lain Produksi perikanan budidaya.

Tabel 19. Hasil Evaluasi Itjen atas SAKIP KKP Tahun 2020

Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja					Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2021	Predikat Penilaian
	Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Capaian		
KKP	27,31	21,26	13,31	8,78	14,06	84,72	A
Itjen	29,25	22,81	13,08	8,50	15,39	89,04	A
Ditjen PSDKP	29,50	21,88	12,73	8,50	15,03	87,64	A
BKIPM	27,22	23,13	13,08	7,88	16,10	87,40	A
Ditjen PRL	28,05	22,19	12,73	8,29	15,76	87,02	A
BRSDMKP	28,05	22,19	13,08	8,50	14,82	86,65	A
Ditjen PB	28,22	22,50	13,35	7,63	14,84	86,54	A
Ditjen PT	28,13	21,92	13,27	7,00	16,11	86,43	A
Ditjen PDS	27,58	22,81	13,08	8,50	14,38	86,36	A
Setjen	25,00	20,62	15,00	8,50	16,86	85,98	A

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan AKIP ini adalah masih kurangnya pemahaman SDM yang menangani dokumen SAKIP, selain itu Penerapan AKIP masih dianggap sebagai pemenuhan dokumen saja. Untuk itu di tahun 2022 akan lebih ditngkatkan lagi pemahaman ini melalu sosialisasi ke Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

IKU 15. Tingkat Maturitas SPIP (Level)

Sasaran Strategis -6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
IKU-15	Tingkat Maturitas SPIP					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
4	3	3,87		33,33	3	133

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Target tingkat maturitas SPIP di lingkungan KKP pada tahun 2021 ditetapkan pada level 3. Level 3 disini maksudnya adalah berkembang dengan indikator ada praktek pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik, pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi dan efektivitas pengendalian belum dievaluasi. Hasil penilaian berdasarkan hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP KKP oleh BPKP Tahun 2018. Dalam hal BPKP tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas SPIP, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP) dengan menggunakan pedoman dari BPKP.

Kegiatan penjaminan kualitas bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP DJPB oleh BPKP. Sesuai dengan Nota Dinas Biro Keuangan Setjen KKP Nomor 3860/SJ.2/KU.130/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Tingkat Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan didapatkan hasil penjaminan kualitas untuk SPIP dengan nilai 3,87. Pada tahun 2021 ini nilai SPIP hanya dilakukan di level 0 (Kementerian) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Eselon 1 lainnya atau dibandingkan capaian dengan Tahun 2020.

Rencana Aksi perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu antara lain melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan kegiatan pada tahun 2022.

Dalam pelaksanaan kegiatan SPIP kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini Ditjen Perikanan Budidaya telah menyelenggarakan Implementasi SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di Sukabumi tanggal 11 Maret sd 13 Maret 2020 dengan anggaran sebesar Rp76.839.000,- dan realisasi sebesar Rp73.482.800,- atau 95,63% dari anggaran.

Permasalahan yang dihadapi yaitu Kurangnya melakukan evaluasi berkala atas penerapan standar kompetensi dan SOP-SOP kepegawaian secara berkala, formal dan terdokumentasi. Kurangnya evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas kebijakan dan prosedur terkait dengan pembinaan SDM. Juga kurangnya evaluasi atas pengamanan umum dan pengendalian secara berkala dan juga kurangnya melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemisahan tugas secara berkala, formal dan terdokumentasi.

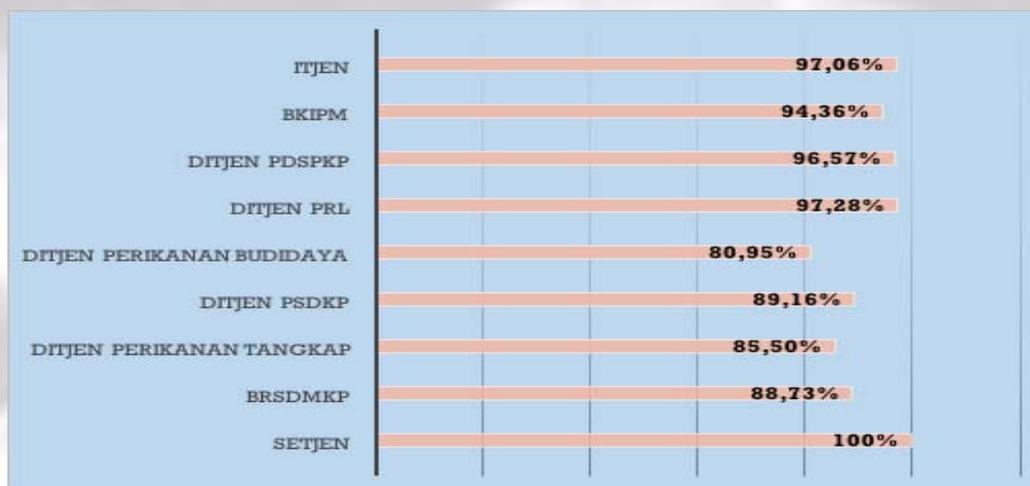
Rencana aksi kedepan yaitu Penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP ini di harapkan bukan hanya untuk kebutuhan status, namun juga harus memastikan optimalnya kebermanfaatannya SPIP bagi peningkatan performa dan ketercapaian tujuan organisasi. Untuk itu rencana aksi yang harus dilakukan oleh DJPB adalah melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPKP.

IKU 16. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)

Sasaran Strategis -6 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya							
IKU-16 Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)							
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
		Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
73,89	65	80,95	124,53	9,55	80	92,36	

Yang dimaksud dengan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan budidaya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti tuntas secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 (31 Desember 2021). Target tahun 2021 adalah sebesar 65% dengan realisasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mencapai

80,95 %. Jika dibandingkan dengan apaian tahun lalu terjadi peningkatan capaian hingga 9,55% tetapi jika dibandingkan dengan capaian Eselon I lainnya (Gambar 12) maka Ditjen Perikanan Budidaya masih dianggap rendah hal ini dikarenakan masih kurang responnya Satker dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut serta adanya rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti.



Gambar 12. Grafik Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2021

Rencana aksi Kedepan akan melakukan pemantauan tindak lanjut secara lebih efektif dan efisien dengan cara akan dilakukan pemantauan secara kontinue tercapaianhadap penyelesaian IKU ini.

IKU 17. Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

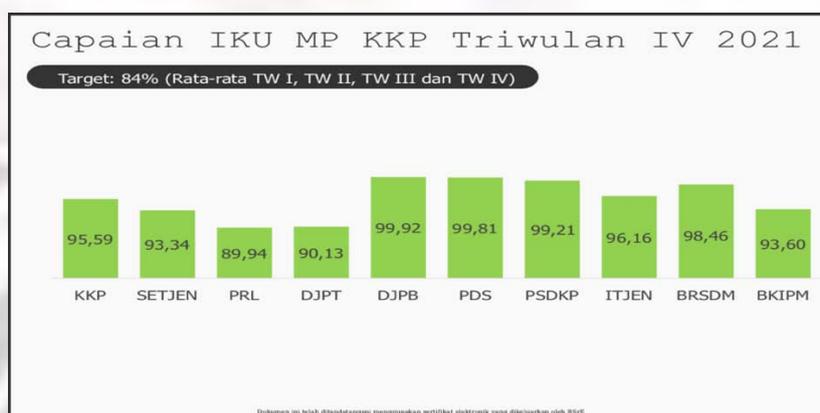
Sasaran Strategis -6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
IKU-17	Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2019-2020	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
92,47	82	99,92	121,95	8,14	90	111,11

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar,

diperoleh dari persentase unit kerja level 0 dan 1 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP. Dalam penerapan

manajemen pengetahuan harus dilengkapi narasi dengan kriteria informasi 5W1H (Who, What, Where, When, Why, dan How) yang disertai dengan notulensi hasil rapat serta foto.

Pada tahun 2021 realisasi IKU inimencaapai terhadap target TW IV sebagaimana Nota Dinas PUSDATIN nomor 76/SJ.7/TU.210/I/2022 tanggal 6 Januari Tahun 2022 tentang capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan IV 2021. Meningkatkan 8,53 % dibandingkan dengan capaian Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan capaian yang diperoleh Eselon I Lainnya lingkup KKP maka Capaian nilai yang diperoleh DJPB mencapai nilai tertinggi.



Gambar 13. Grafik capaian IKU MP KKP Triwulan IV Tahun 2021

Secara umum pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak ada kendala yang berarti, dikarenakan adanya komunikasi yang dilakukan secara terus menerus secara mandiri dengan para peserta yang bertujuan untuk mengingatkan. Selain itu, juga dilakukan koordinasi secara aktif dengan para koordinator tata usaha di masing-masing unit kerja. Adapun hal-hal yang menjadi kendala belum optimalnya kesadaran dari masing-masing peserta dikarenakan oleh aktivitas serta beban kerja lainnya. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, yaitu : (i) perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin (setiap triwulan) untuk dapat mengawal pencapaian target; (ii) mengoptimalkan aktivitas dalam mengunggah informasi pada aplikasi manajemen pengetahuan yang terstandar sehingga nilai capaian dan target yang telah ditentukan dapat terpenuhi; dan (iii) menindaklanjuti permasalahan dan kendala dari peserta dengan melakukan koordinasi yang intensif bersama-sama dengan Pusdatin sehingga setiap permasalahan dapat teratasi.

IKU 18. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik

Sasaran Strategis -6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
IKU-18	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
3	1	2	200	0	1	300

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Instansi pemerintah dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan publik sehingga inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Inovasi juga tidak boleh monoton karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Tujuan adanya Kebijakan pelayanan publik adalah untuk : (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa : (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

berdasarkan BA Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Nomor B1721/SJ.7/PL.450/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, terdapat dua unit kerja di DJPB yang telah mengajukan proposal inovasi pelayanan publik yaitu BP2IL Serang dengan UTILITAS (Unit cepaT di Lapangan parameter nitriT dAN foSfat) dan BPBL Batam dengan SEKAWAN LOGIK (Sentra Kawasan Budidaya Dengan Sistem Logistik Benih yang Mandiri)

Anggaran untuk mendukung IKU ini dibebankan pada unit yang mempunyai inovasi pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan UPT lingkup DJPB agar bisa menciptakan inovasi lainnya, diharapkan inovasi yang telah ada dapat diterapkan dan dapat diadopsi oleh unit kerja lainnya.

IKU 19. Nilai IKPA DJPB

Sasaran Strate Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya						
IKU-19 Nilai IKPA DJPB						
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
90,90	89	91,27	102,55	0,40	89	102,55

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi,

efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Setiap aspek memiliki komponen yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, Rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Ditjen. Perikanan Budidaya Tahun 2021 sebesar 91,27 dari target sebesar 89 (persen capaian 102,55% meningkat sebesar 0,40 dari capaian Tahun 2020).

Tabel 20. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

No	Aspek/Komponen	Nilai (%)	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek (%)
1	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan				89,55
	a. Revisi DIPA	99,75	5	4,99	
	b. Hal III DIPA	68,99	5	3,45	
	c. Pagu minus	99,99	5	5	
2	Kepatuhan terhadap regulasi				96,36
	a. Data Kontrak	96	10	9,60	
	b. Pengelolaan UP dan TUP	95	8	7,60	
	c. LPJ Bendahara	99,50	5	4,98	
	d. Dispensasi SPM	95	5	4,75	
3	Efektivitas pelaksanaan kegiatan				90,34
	a. Penyerapan anggaran	75,09	15	11,26	
	b. Penyelesaian tagihan	93,37	10	9,34	
	c. Konfirmasi capaian Output	93,37	17	15,83	
	d. Retur SP2D	99,80	5	4,99	
4	Efisiensi pelaksanaan kegiatan				95
	a. Renkas	100	5	90	
	b. Kesalahan SPM	90	5	4,5	
	Nilai Total				91,27
	Konversi Bobot				100
	Nilai Akhir				91,27

Sumber: SMART, melalui Nota Dinas Biro Keuangan KKP RI, Nomor 68/SJ.2/RC.610/1/2022 Tanggal 14 Januari 2022



Gambar 14. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Eselon I lingkup KKP

Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian IKPA DJPB berada di urutan ke 6. Ini terjadi karena pada unsur halaman III DIPA masih rendah perolehan capaiannya hanya mencapai 68,99. Hal tersebut disebabkan kedisiplinan satker dalam merubah Halaman III DIPA pada saat revisi DIPA masih sangat rendah.

Ke depan akan lebih ditingkatkan lagi pemantauan terhadap kedisiplinan Satker dalam pengelolaan keuangan.

IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran DJPB

Sasaran Strategis -6 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya						
IKU-19 Nilai IKPA DJPB						
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Renstra DJPB 2020-2024	
	Target	Realisasi	%		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
68,35	86	89,89	104,52	31,51	86	104,25

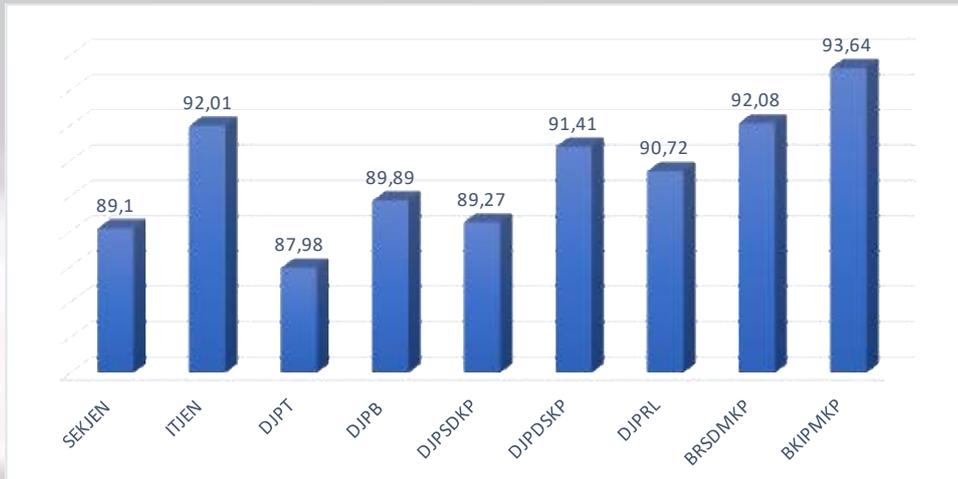
Sumber: SMART, melalui Nota Dinas Biro Keuangan KKP RI, Nomor 68/SJ.2/RC.610/1/2022 Tanggal 14 Januari 2022

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Perikanan Budidaya Tahun 2021 sebesar 89,89 dari target sebesar 86 atau 104,52%.

Ada 3 (tiga) Aspek penghitungan nilai kinerja yaitu aspek Implementasi, Aspek manfaat dan aspek konteks, untuk level satker Ditjen Perikanan Budidaya aspek yang nilai adalah aspek implementasi yang terdiri dari:

1. Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program sebesar 100%;
2. Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker sebesar 98,55%.
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan sebesar 87,36;
4. Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran sebesar 100%;
5. Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran sebesar 8,77%;

6. Rata rata Nilai Kinerja Satker mencapai 83,27.



Gambar 15. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran dengan Eselon I lingkup KKP

Walaupun capaian NKA tahun ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 89,89 dari target 86 tetapi apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Anggaran Eselon 1 lainnya terlihat bahwa DJPB masih dibawah capaian Eselon 1 lainnya. Ini terjadi karena masih banyaknya satker yang tidak disiplin untuk menginput ke aplikasi SMART.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai NKA ini, DJPB akan lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan satker satker di bawah DJPB dan melakukan bimtek untuk operator smart.

IKU 21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis -6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
IKU-21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang /Jasa Ditjen Perikanan Budidaya					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
	Target	Realisasi	%			
-	72,5	55,26	76,22	-	80	69,07

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2021 dilihat berdasarkan ¹⁾ ketersediaan manajemen resiko pebungadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya ²⁾ perencanaan dan persiapan pengadaan ³⁾ presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE ⁴⁾ kesesuaian tahap pelaksanaan ⁵⁾ Laporan penyelenggaraan PBJ ⁶⁾ persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya triwulan I s.d triwulan III tahun 2021. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ.

Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP nomor:46/ITJ.0/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Capaian IKU tingkat kepatuhan pengadaan barang/Jasa lingkup KKP tahun 2021, Ditjen Perikanan Budidaya mendapatkan angka 55,26% atau hanya mencapai 76,22% dari target 72,5%. Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2021 merupakan indikator baru sehingga tidak bisa disandingkan dengan indikator sejenis periode pengelolaan kinerja sebelumnya.. Dengan nilai kepatuhan tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya menempati posisi terakhir lingkup KKP sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini.



Gambar 16. Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup KKP Tahun 2021

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pengadaan barang/jasa diantaranya ¹⁾ penandatanganan kontrak paket pengadaan barang/jasa hingga triwulan III tahun 2021 ²⁾ belum semua pengadaan diumumkan dalam SIRUP ³⁾ terdapat beberapa penyelesaian pengadaan kontrak yang terlambat ⁴⁾ meskipun pelaporan progres barang/jasa dilakukan setiap bulan namun berdasarkan kesepakatan lingkup KKP untuk pelaporan progres pengadaan barang/jasa menggunakan laporan dari UKPBJ yang diterbitkan setiap triwulan.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya diantaranya pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan.

IKU 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

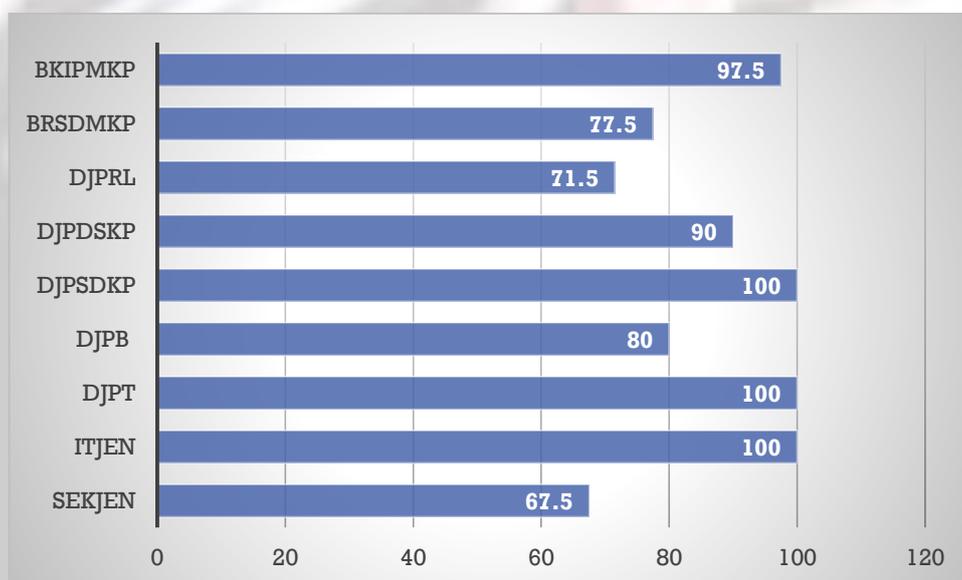
Sasaran Strategis -6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
IKU-22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya					
Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			% Pertumbuhan 2020-2021	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
	Target	Realisasi	%			
-	72,50	80	110,34	-	80	100

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2021 dilihat berdasarkan ¹⁾ pengelolaan rencana kebutuhan BMN tahun 2020, ²⁾ ketersediaan usulan penetapan status penggunaan

BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan I tahun 2021 ke pengguna barang maupun pengelola barang, ³⁾ penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019, ⁴⁾ pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan ⁵⁾ Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Realisasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2021 berdasarkan nota dinas dari Inspektorat Jenderal KKP nomor 47/ITJ.0/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari Tahun 2022 tentang Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2021 mencapai 80% atau sebesar 110,34% dari target 72,50%

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat disandingkan dengan periode sebelumnya. Jika dilihat dari perolehan capaian IKU ini pada grafik dibawah ini terlihat posisi Ditjen Perikanan Budidaya menempati posisi ke-lima.



Gambar 17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup KKP Tahun 2021

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator Kinerja Ini antara lain mengikuti sosialisasi Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan BMN yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal KKP pada triwulan III tahun 2021.

Hal yang harus ditingkatkan adalah self awareness bagi pimpinan dan pengelola PBMN masing-masing unit kerja bahwa pengelolaan BMN telah ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja yang diukur tingkat kepatuhan pengelolaannya.

3.3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kierja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas, atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Tabel 21. Efisiensi Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT PER SS	% REALISASI	EFISIENSI
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	782.065.357.000	770.399.106.401	102,25%	98,51%	3,74%
2	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat”	0	0	122,31%	0,00%	122,31%
3	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	85.116.073.000	84.627.126.945	103,24%	99,43%	3,81%
4	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	312.725.052.000	308.115.529.409	79,21%	98,53%	-19,32%
5	Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan budidaya yang partisipatif	84.750.751.000	84.058.095.373	103,8%	99,18%	4,62%
6	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	299.473.481.000	293.598.354.674	122,09%	98,04%	24,05%

Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas video confrence, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, dan pengurangan biaya perjalanan dinas. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Ditjen Perikana Budidaya untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi Perikanan Budidaya namun tetap menjaga kualitas kinerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2021 pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp.1.190.280.866.000,- kemudian mengalami beberapa kali *refocussing* anggaran menjadi Rp782.065.357.000,- sehingga berdasarkan data dari *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* sampai dengan tahun

2021, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya telah tercapai sebesar Rp770.399.106.401,- (98,51%), meningkat secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun 2020 pada triwulan yang sama yaitu sebesar 79,11%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya triwulan IV tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 dan 2020

TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
2021*	782.065.357.000,-	770.399.106.401,-	98,51
2020	1.018.205.687.000,-	805.480.486.256,-	79,11

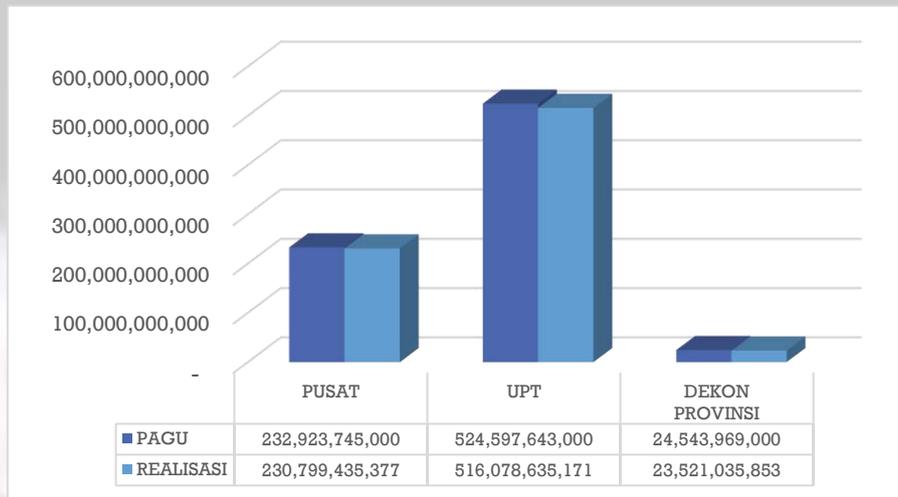
*sumber data smart keuangan per 31 Desember 2021

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya TA 2021 tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp187.162.901.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp494.147.910.000,-; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp100.754.546.000,-.

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Tahun 2021 dan 2020

JENIS BELANJA	TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	187.162.901.000	183.126.257.770	97,84	202.274.395.000	183.545.671.895	90,74
Barang	494.147.910.000	487.048.948.366	98,56	757.696.657.000	581.602.590.522	76,76
Modal	100.754.546.000	100.223.900.265	99,47	58.234.635.000	40.332.223.839	69,26
Total	782.065.357.000	770.399.106.401	98,51	1.018.205.687.000	805.480.486.256	79,11

Prosentase anggaran belanja Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2021 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Barang, sedangkan untuk Belanja Modal dan Belanja Pegawai cukup meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.



Gambar 18. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker Pusat (99,09%), sedangkan yang terendah yaitu pada satker Dekon Provinsi (95,83%) sebagaimana berikut:

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 99.09 %. dengan adanya aturan satu dipa maka satker pusat seluruhnya tergabung dalam satu satker.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 98,38%. dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 99,80% dan terendah pada Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 96,26%

3. Satker Dekonsentrasi Provinsi

Realisasi anggaran pada satker Dekonsentrasi Provinsi keseluruhan sebesar 95,83%. dengan capaian terbesar terdapat pada Provinsi Papua 100% dan terendah pada provinsi Bali 63,71%

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada periode tahun bersangkutan dan merupakan capaian awal untuk periode RPJMN 2020-2024.
2. Terdapat perbedaan target antara target yang tercantum pada Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan PK DJPB Tahun 2021. Perbedaan target tersebut terjadi pada indikator;
 - a. Pengelolaan kawasan cluster perikanan budidaya dimana pada renstra ditetapkan 28 kawasan sementara di PK ditetapkan 10 kawasan
 - b. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor pada Renstra ditetapkan 17.855 sementara di PK di tetapkan 6.847

Perbedaan penetapan ini terjadi karena pada saat penyusunan anggaran, besarnya anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan indikator tersebut tidak bisa memenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam renstra dan di tengah tahun anggaran terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan perubahan target yang disesuaikan lagi dengan besarnya anggaran

3. Ada penambahan 2 IKU baru berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor 4.11/ITj.0/R.C.610/I/2021 tanggal 11 Januari Tahun 2021 yaitu Indikator baru pada tahun 2021 yaitu Indikator Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan Indikator Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN.
4. Terhadap capaian kinerja, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
5. Secara umum, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang diperjanjikan, sebagian besar telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dengan capaian rata-rata sebesar 105,07%.
6. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Tidak tercapainya target produksi ikan dan produksi ikan hias dikarenakan beberapa faktor diantaranya :
 - a. Regulasi : sejak di berlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan daerah, dimana kegiatan budidaya lebih banyak merupakan kewenangan Kabupaten terutama budidaya air tawar, padahal disatu sisi kabupaten/kota belum siap untuk mengembangkannya sehingga mengakibatkan terhambatnya pengembangan perikanan budidaya.
 - b. Sarana dan prasarana : Masih terbatasnya fasilitas pembenihan baik secara kualitas maupun secara kuantitas; Harga pakan yang masih cukup tinggi karena sebagian besar bahan baku masih impor, meskipun pemerintah telah melakukan program gerakan pakan mandiri tetapi masih belum mencukupi kebutuhan pakan nasional.
 - c. Masih munculnya hama penyakit ikan.
 - d. Kurangnya Fasilitas pengolahan mengakibatkan pembudidaya tidak dapat memaksimalkan produksinya. Fasilitas pengolahan ini cukup berperan karena sifat produk perikanan yang mudah rusak, sehingga diperlukan Teknik penanganan yang baik untuk menjaga kualitas dan nutrisi produk.
 - e. Pandemi covid juga mempengaruhi aktivitas perikanan budidaya

- b. Perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal;

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
2	<p>Tidak tercapainya target produksi ikan dan produksi ikan hias dikarenakan beberapa factor diantaranya :</p> <p>i. Regulasi : sejak di berlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan daerah, dimana kegiatan budidaya lebih banyak merupakan kewenangan Kabupaten terutama untuk kegiatan budidaya air tawar mengakibatkan terhambatnya pembangunan perikanan budidaya. Ini terjadi karena banyak Kabupaten/Kota yang anggarannya terbatas untuk pengembangan budidaya;</p> <p>ii. Sarana dan prasarana : Masih terbatasnya fasilitas pembenihan baik secara kualitas maupun secara kuantitas; Harga pakan yang masih cukup tinggi karena sebagian besar bahan baku masih impor, meskipun pemerintah telah melakukan program gerakan pakan mandiri tetapi masih belum mencukupi kebutuhan pakan nasional.</p> <p>iii. Hama penyakit ikan</p> <p>iv. Kurangnya Fasilitas pengolahan mengakibatkan pembudidaya</p>	<p>i. Untuk mengembalikan kembali peranan provinsi dalam pengembangan perikanan budidaya, maka KKP telah mengajukan RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren terkait implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014.</p> <p>ii. Peningkatan fasilitas unit pembenihan di daerah melalui rehabilitasi sarana dan prasarana UPT baik pusat melalui dana APBN maupun UPTD melalui dana DAK. Melakukan kerjasama dengan Badan Riset untuk menghasilkan induk yang bermutu.</p> <p>iii. Untuk mengantisipasi tiingginya harga pakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tetap melaksanakan kegiatan gerakan pakan mandiri dan juga melakukan trobosan untuk penyediaan pakan alternative, misalnya maggots.</p> <p>iv. Pemantauan secara continue untuk penanggulangan hama penyakit ikan</p> <p>v. Ditjen Perikanan Budidaya melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Ditjen PDS untuk penyediaan Sarana pengolahan di sentra sentra produksi perikanan budidaya.</p>

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
	<p>tidak dapat memaksimalkan produksinya. Fasilitas pengolahan ini cukup berperan karena sifat produk perikanan yang mudah rusak, sehingga diperlukan Teknik penanganan yang baik untuk menjaga kualitas dan nutrisi produk.</p>	
2	<p>Perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kinerja berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia - Memperbaiki penghitungan/ Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja dan penelaahan secara cermat terkait metode penghitungan capaian setiap Indikator kinerja serta factor-faktor yang mempengaruhi penghitungan capaian. - Menyelenggarakan Bimtek penyusunan LKJ dan perjanjian kinerja, sekaligus pengukuran dan pengisian aplikasi pengelolaan kinerja secara berkala. - Melakukan asistensi Laporan Kinerja eselon II dan UPT DJPB sebagai upaya peningkatan kualitas laporan kinerja - Menyelenggarakan rapat pengendalian rutin (bulanan, triwulanan) yang melibatkan pimpinan dan penanggungjawab kegiatan





**Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Gedung Minabahari IV Lantai 5 - 8
Jl. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat**